

**NOTULEN RAPAT**  
**PERTEMUAN TIM TEKNIS**

Tempat : Hotel Mandarin, Jakarta  
Tanggal : 4 Februari 2011  
Waktu : 10.00-17.00 WIB

**Notulen:**

- Pertemuan dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas).
- Pada pembukaan pertemuan Pak Dewo mengulang kembali hasil-hasil dari lokakarya di Bandung tanggal 14 Januari 2011.
- Pak Adik menjelaskan tentang draf ke-2, yang dibuat berdasarkan rekomendasi dari pertemuan di Bandung. Pada prinsipnya sudah disepakati untuk menyusun 2 dokumen output: yaitu Background Paper sebagai output dari Basic Study yang didanai oleh JICA dan Grand Design sebagai output dari Pemerintah. Pada prinsipnya Beliau menyusun background paper berdasarkan masukan dan saran dari Tim Teknis khususnya dari Pak Otto dan Bu Siliwati dari Bappenas. Namun, karena ada perbedaan dalam penulisan background paper dan Grand Design, maka visi dan misi yang telah disepakati di Bandung tidak dimasukkan ke dalam Background Paper tetapi nantinya dimasukkan ke dalam Grand Design. Dokumen ini lebih difokuskan pada kerjasama teknik daripada kerjasama ekonomi. Dan difokuskan hanya pada penyiapan Background Paper.
- Pak Thalib dari KADIN menyatakan bahwa pada prinsipnya kerjasama ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam dekade ini, dapat dilaksanakan dalam bentuk G2G atau B2B. Hal ini juga diperkuat dengan posisi Indonesia dalam G-20, yang mensyaratkan agar Indonesia harus bertindak dan berfikir secara global.
- Bu Theodora dari BKKBN merekomendasikan untuk memasukkan visi dan misi yang telah disepakati di Bandung pada Background Paper. Background Paper harus dibuat lebih lengkap untuk dapat memperkuat dalam penyusunan Grand Design. Prioritas seperti yang disebutkan dalam halaman 20 Draft ke-2, harus dengan jelas menjelaskan output yang akan dicapai oleh tiap program. Dan juga penting untuk menjelaskan tentang dasar hukum dan mekanisme koordinasi dalam kerangka kelembagaan.
- Pak Darianto dari Direktorat Teknis Kemenlu menghendaki agar Grand Design merupakan metamorphosis dari *Background Paper*. Karenanya harus lebih komprehensif agar nantinya bisa dipergunakan oleh Tim Teknis sebagai acuan dalam tahap pelaksanaan. Terkait dengan PPP, Kemenlu telah mulai menugaskan stafnya untuk menangani proyek-proyek PPP agar bisa diselaraskan dengan kebutuhan untuk lebih fokus pada konsep kemitraan, memperluas jaringan dengan Lembaga Non Pemerintah atau swasta. Terkait dengan Kerjasama Teknik, setuju dengan Pak Adik bahwa Kerjasama Teknik harus diikuti oleh Kerjasama Ekonomi. Karena kerangka berfikirnya orang miskin tidak akan mudah untuk bekerjasama. Kemudian, untuk bisa bekerjasama dengan orang miskin, maka kerjasama teknik harus dikedepankan. Untuk itu, saat ini Kemenlu bersama-sama Setneg dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum membantu Timor Leste dalam membangun jalan di daerah perbatasan yang bertujuan untuk mempercepat

perpindahan barang dari Indonesia yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia terutama bagi Propinsi NTB. Dan terkait dengan pembentukan “National Focal Point”, Kemenlu berencana mengundang Pak Adik untuk mendiskusikan mengenai hal tersebut. Dikaitkan juga dengan “*East Looking Policy*” untuk merangkul negara-negara kecil di timur.

- Sehubungan dengan identifikasi program-program unggulan, ada banyak potensi, tetapi perlu untuk menetapkan kriteria program unggulan terlebih dahulu, misalnya: berdasarkan program yang sering dimintakan (intensitas), kaitannya dengan isu-isu MDG, kebutuhan negara penerima, siapa kompetitornya dan keuntungannya bagi Indonesia dibandingkan dengan negara lain atau apakah program-program yang sudah dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi dari negara-negara berkembang, dan sebagainya.
- Pak Thalib dari KADIN menginformasikan bahwa saat ini peran Indonesia telah berubah, karenanya visi dan misi KSS juga harus berubah diselaraskan dengan perubahan peran tersebut. Saat ini negara-negara miskin lebih menginginkan kerjasama ekonomi daripada kerjasama teknik. Indonesia harus lebih jauh berfikir tentang kelembagaan yang bertujuan untuk membangun saling pengertian dan saling menguntungkan, yang diarahkan pada kerjasama teknik dan kerjasama ekonomi, meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Dengan ikut berpartisipasi pada forum-forum internasional, penguatan regulasi bea cukai di kawasan, karantina serta dialog investasi perdagangan dapat dilakukan untuk mendorong KENB serta untuk memperkuat kerjasama. Pembelajaran dari KTNB sebelumnya, bahwa banyak negara-negara Asia dan Afrika yang sekarang lebih maju dari Indonesia di beberapa sektor, karena Indonesia membuka semua informasi selama melaksanakan KTNB tersebut. Ada banyak permintaan dari negara-negara Afrika yang ingin mengetahui lebih detil mengenai cara membangun pabrik karet, solar plant dan Teknologi Informasi. Misalnya Afrika Selatan ingin membeli radiasi matahari dari Indonesia untuk menanggulangi kekurangan suplai listrik mereka. Sebagai kompetitor, Cina dan India lebih maju dan secara agresif memasuki negara-negara Afrika. Dan khusus mengenai micro finance, hadiah Nobel yang diberikan untuk sistem perbankan Syariah dimodifikasi dari sistem pembiayaan syariah Indonesia.
- Iwan dari Kemendiknas menanyakan apakah dasar hukum PPP untuk memperkuat keterlibatan swasta sudah ada atau belum? Dan perlu juga diperkuat bagaimana hubungan antara kerjasama triangular dengan mekanisme pencatatan hibah.
- Bu Agustin (Bappenas) menginformasikan bahwa ada dua periode dalam aid effectiveness: yaitu sebelum dan sesudah Deklarasi Paris tahun 2005, yang dinasionalisasikan menjadi which Komitmen Jakarta pada tahun 2009. Ada juga forum di Bangkok, tetapi tidak dikhususkan untuk kerjasama teknik atau kerjasama ekonomi, tetapi untuk aid effectiveness. KSS menjadi intensif sejak tertulis dalam road map. Ada banyak hal yang bisa dipergunakan sebagai referensi sebelum Komitmen Jakarta, misalnya adanya Trust Fund akan memberikan manfaat bagi Indonesia, prinsip-prinsip kemitraan dan ownership terutama sejak Indonesia menjadi middle income country, berubah dari negara penerima menjadi negara pemberi. Bagaimana kerjasama teknik bisa diubah menjadi kerjasama pembangunan atau mungkin dari kerjasama ekonomi menjadi kerjasama pembangunan, dalam mencapai visi “Kemitraan yang lebih Baik untuk Kesejahteraan”. Penting juga dicatat bahwa tidak semua teknologi dari Indonesia bisa dibagikan ke negara-negara penerima.

- Pak Tholib menginformasikan bahwa berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) merupakan nilai penting. Tetapi bahkan negara maju pun tidak membagikan semua ilmunya ke negara-negara berkembang. Dalam G-20, *knowledge sharing* merupakan salah satu pilar, yang dilaksanakan melalui kerjasama pembangunan. Perlu juga dibahas mengenai kebutuhan akan *knowledge sharing* dalam KSS. Terkait dengan kelembagaan, lebih baik memimpikan hal-hal yang besar dulu. Jika akan ada suatu *National Focal Point*, harus dikaitkan dengan Lembaga Internasional. Akan sulit untuk membahas tentang kerjasama jika tidak ada hubungan yang mendasari dan inisiatifnya. Perlu untuk membuat suatu inisiatif dibawah kepemimpinan Indonesia. Dan akan ada Council of Minister (COM) di tingkat International, serta Senior Official Committee (CSO) di tingkat nasional untuk memfasilitasi sektor swasta.
- Pak Dewo menginformasikan bahwa saat ini Indonesia berperan sebagai Pimpinan di ASEAN, Wakil Ketua Satgas KSS (TT-SSC), anggota G-20, dan sebagainya. Karenanya, manajemen di tingkat nasional diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan.
- Pak Adik menjelaskan bahwa semua input akan diakomodasi dalam Background Paper. Namun, perlu adanya suatu komitmen mengenai fokus kerjasama apakah pada kerjasama teknik atau kerjasama ekonomi, atau keduanya? Dan terkait dengan program unggulan, apa yang akan menjadi program unggulan kerjasama teknik?
- Saran dari Pak Dewo:
  - Diharapkan agar semua saran dan rekomendasi diakomodasikan dalam Background Paper.
  - Jika ada pengulangan dalam background paper, harus dibuang.
  - Terkait dengan kondisi strategis, kajian mengenai GDP, nilai ekspor serta kajian dari Standard Charter dan ADB harus dimasukkan, terutama yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi no. 5 di dunia pada tahun 2030 atau 2050. Kemudian, harus dijelaskan juga tentang perdagangan ke negara-negara selatan yang juga berkontribusi GDP global.
  - Terkait dengan isu global, harus dimasukkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan KSS dan peran Indonesia khususnya dalam G-20, dan juga mengenai *knowledge sharing* dalam KSS, diparalelkan juga dengan kerjasama dengan Australia mengenai proteksi sosial, sebagai Ketua ASEAN dan peran organisasi multilateral seperti ADB, World Bank dalam kerjasama global. RPJMN dan kebijakan luar negeri Indonesia bisa dipakai sebagai acuan.
  - Visi dan misi harus dimasukkan ke dalam Grand Design dan Cetak Biru. Kebutuhan untuk mengembangkan jejaring seperti yang dijelaskan oleh Pak Thalib akan menjadi faktor pendukung dalam pembentukan *National Focal Point*.
  - Cetak Biru harus singkat, jelas dan langsung ke point yang diharapkan.
  - Untuk program unggulan perlu informasi dari Kementerian/Lembaga terkait, dan kriterianya harus ditetapkan. Perlu penjelasan lebih detil mengenai kerjasama ekonomi, yang sesuai dengan arahan Tim Pengarah, bagaimana Kerjasama Teknik dapat menjadi pendorong Kerjasama Ekonomi atau bagaimana keduanya dapat dilakukan secara paralel untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari KSS.

- Untuk monitoring dan evaluasi, kerangka kebijakannya harus lebih detil dijelaskan.
- Secara umum harus mengacu pada hasil pertemuan di Bandung.
- Pak Adik kemudian menjelaskan bahwa input dan rekomendasi Bu Siliwati dan Pak Otto telah diakomodasi. Tentang Volunteer telah diakomodasi pada Bab IV. Saran mengenai *center of excellent* sangat baik. Akses informasi telah diakomodasi dalam pengembangan database yang termasuk dalam kontrak. Untuk monitoring dan evaluasi, kriterianya perlu dirancang. Rekomendasi untuk memasukkan analisa balance score card sulit dilaksanakan karena membutuhkan tenaga ahli. Triple helix jika diperlukan akan dimasukkan lagi ke dalam Background Paper. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sudah diakomodasi dalam Bab V. Sumber Pembiayaan.
- Bu Siliwati menjelaskan bahwa pada prinsipnya dokumen yang disusun sudah dibuat seperti yang diharapkan, hanya perlu proses editing dan *final decision* untuk memasukkan atau tidak memasukkan ide-ide yang ada. Ide tentang triple helix harus dimasukkan.
- Pak Otto memberikan komentar mengenai tujuan Grand Design yang tertulis untuk mendorong koordinasi. Apakah benar seperti itu yang diharapkan? Kalau tidak, harus diformulasikan dengan baik.
- Akhirnya Pak Dewo memutuskan bahwa draf ke-2 harus diubah berdasarkan input dari pertemuan ini. Karena akan sulit untuk menyiapkan dua jenis dokumen sebagai output, maka Pak Dewo minta untuk fokus pada penyelesaian Grand Design. Pertemuan selanjutnya akan mengundang Kadin, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kemenkeu dan Kemenlu dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Feb 2011 agar bisa fokus pada pembahasan mengenai kerjasama ekonomi, pembiayaan dan pendefinisian kawasan. Selanjutnya akan diikuti dengan pertemuan dengan Tim Pengarah pada tanggal 21Feb 2011.
- Pada sesi terakhir, Pak Mesnan sebagai System Analyst menjelaskan tentang Flowchart Sistem Informasi seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 3.1 dan menunjukkan bahwa database akan ditempelkan pada prototipe yang sudah dibangun oleh CEACoS.
- Pak Dewo menjelaskan bahwa pada prinsipnya Sistem Informasi akan dikaitkan dengan kebijakan pengambilan keputusan, yang diarahkan pada perencanaan yang lebih efektif di masa mendatang. PT. Indokoei diharapkan dapat menginput data dari K/L terkait dan jika perlu akan difasilitasi dengan surat dari Bappenas untuk mengunjungi K/L. KSS Indonesia diharapkan akan diluncurkan pada Seminar Nasional pada akhir Maret 2011.
- Fachrurozi dari Setneg menjelaskan bahwa pada prinsipnya konsep database sudah cukup komprehensif, tetapi untuk dapat mengakomodasi kepentingan pengguna dari luar negeri, maka Sistem Informasi harus dibuat dalam 2 bahasa: Indonesia dan Inggris. Perlu juga untuk menambahkan pada menu “partner” untuk tidak terbatas pada 5 partner yang ada di flowchart. Kawasan Eropa Timur juga bisa ditambahkan. Juga perlu untuk menambahkan menu of “Current SSC Issues”.
- Bu Theodora menanyakan apakah akan ada website baru dan tersendiri untuk KSS Indonesia dan perlu untuk menambahkan versi Inggris dalam Sistem Informasi untuk mengakomodasi kepentingan promosi ke luar negeri. Perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai administrator dan

untuk update informasi tersebut nantinya. Jika data tersebut tidak di perbaharui secara periodik, maka akan kurang manfaatnya.

- Pak Iwan menanyakan mengenai lapisan pengguna dan merekomendasikan untuk mengupload report dalam format pdf.
- Pak Dewo menjelaskan bahwa untuk sementara Sistem Informasi KSS Indonesia akan ditempatkan pada website Bappenas. Jika nantinya diputuskan untuk menggunakan domain khusus maka Bappenas akan mengaturnya.
- Bu Uzaimah menjelaskan bahwa pada prinsipnya Konsultan bekerja berdasarkan prototipe yang dirancang oleh CEACoS dan karenanya menggunakan bahasa Indonesia. Membuat 2 versi data base berarti membuat 2 website. Karena masa studi hanya sampai dengan akhir Maret 2011, maka akan sulit untuk menyiapkannya dalam 2 bahasa. Jika disepakati dalam bahasa Inggris, maka beberapa kalimat yang sudah dirancang oleh CEACoS seperti judulnya “Kerjasama Selatan Selatan” akan tetap dalam bahasa Indonesia. Dan input data dari K/L akan dilaksanakan sampai maksimum data yang diperoleh pada akhir Maret 2011.
- Pak Darianto mengoreksi bahwa ASEAN adalah nama organisasi bukan kawasan, sedangkan nama kawasannya adalah Asia Tenggara, dan ASEAN harus dimasukkan sebagai salah satu partner dalam KSS.
- Bu Siliwati mengatakan bahwa perlu untuk mendefinisikan siapa yang akan menggunakan sistem ini. Jika untuk perencanaan, maka output dari sistem informasi harus menjawab kebutuhan dalam perencanaan program ke depan. Informasi yang dibutuhkan berupa nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, tempat dan anggaran dan tidak membutuhkan informasi yang begitu kompleks. Tetapi jika untuk promosi, maka akan menjadi berbeda.
- Pak Adik menginformasikan bahwa untuk KSS akan dipakai definisi yang digunakan oleh UN dan perlu diketahui bahwa tugas Konsultan hanya mengembangkan website yang sudah dibangun CEACoS, dan untuk memperbahai artikel mengenai *current issues* nantinya merupakan tugas administrator.
- Akhirnya diputuskan bahwa Konsultan hanya akan menyiapkan database dalam bahasa Inggris dan beberapa kata yang sudah didesain oleh CEACoS akan tetap dalam bahasa Indonesia. Konsultan juga akan membuat buku panduan untuk sistem informasi tersebut.
- Bu Agustin merekomendasikan untuk menambah menu “kalender tahunan atau event” untuk menginformasikan program/aktifitas yang akan dilaksanakan oleh K/L.



**RAPAT TIM TEKNIS**  
TIM KOORDINASI KERJASAMA SELATAN-  
SELATAN

Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas

Jakarta, 4 Februari 2011

**AGENDA**

09.30 - 10.00	Registrasi
10.00 - 10.15	Pembukaan dan Pembacaan Hasil Pertemuan Bandung oleh : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
10.15 - 10.45	Presentasi Draft kedua Grand Design KSS oleh : Tim Konsultan
10.45 - 11.00	Tanggapan umum Direktur Pendanaan LN Multilateral
11.00 - 12.00	Diskusi Grand Design
12.00 - 13.30	Istirahat, makan siang, sholat Jumat
13.30 - 15.30	Diskusi Grand Design
15.30 - 16.00	Presentasi Database oleh Tim Konsultan
16.00 - 17.00	Diskusi Database
17.00 - 17.15	Penutup

**HASIL PEMBAHASAN 14-15 JANUARI 2011**

- Grand Design dan Blue Print merupakan dokumen yang disusun dan dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah → Dukungan JICA dan UNDP dalam bentuk background paper
- Dalam substansi, perlu ditambahkan arah kebijakan, strategi, prinsip-prinsip KSS serta promosi dan publikasi
- Prinsip yang perlu dicantumkan antara lain sustainability dan aid effectiveness
- Kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam KSS perlu secara jelas disebutkan
- Perlu ada keterkaitan antara bagian politik luar negeri dengan bagian ekonomi dan perdagangan
- Penggunaan metode ilmiah seperti cost-benefit analysis
- Penekanan KSS pada Kerjasama Teknik dan Kerjasama Ekonomi untuk kepentingan nasional
- Perlu dilakukan pembahasan detail terkait mekanisme pendanaan
- Perlu menentukan quick win dan target pencapaian setiap tahunnya
- Perlu melakukan series meeting dengan K/L, pemda, universitas, swasta dan pihak terkait lain dalam menyusun prioritas kerjasama dan publikasi

**HASIL PEMBAHASAN 14-15 JANUARI 2011**

**VISI KSS INDONESIA:**

*"Better Partnership for Prosperity"*  
*"Kemitraan yang Lebih Baik untuk Kesejahteraan"*

**MISI KSS INDONESIA:**

- Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional
- Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Negara-Negara Selatan
- Mengembangkan kerjasama teknik, sosial, budaya dan iptek dengan Negara-Negara Selatan
- Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional

**OUTLINE GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS**

- Grand design dan blue print merupakan dokumen yang terintegrasi
- Kerangka waktu Grand Design 2010-2025, sedangkan kerangka waktu blue print 2010-2014
- Landasan Hukum: menjelaskan dasar hukum yang memberikan kewenangan dan amanat untuk melaksanakan KSS di Indonesia
- Arah Kebijakan dan Strategi: mendetailkan arah kebijakan KSS dalam RPJMN dan renstra polugri.
- Diharapkan dapat memasukkan target kepentingan nasional setiap lima tahun
- Pembahasan kerangka hukum akan menjadi bagian dari bab kelembagaan

**OUTLINE GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS**

**I. PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum dan Amanat Pengembangan KSS
- c. Tujuan penyusunan Grand Design dan Blue Print KSS
- d. Kerangka Pewaktuan rencana pengembangan KSS
- e. Cakupan dan Ruang Lingkup Pengembangan KSS

**II. KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA PELAKSANAAN KSS**

- a. Kondisi Lingkungan Strategis KSS
  - i. Internal
  - ii. Eksternal
    - Bilateral
    - Regional
    - Multilateral
    - Global
- b. Modal Dasar dan Peran Penting Indonesia dalam Pelaksanaan KSS
- c. Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi

### OUTLINE GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS

#### III. PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS

- a. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan KSS
  - Kepentingan Nasional
  - Aid effectiveness
  - Solidaritas
  - Transparansi
  - Sustainability
  - Inklusif
  - Knowledge sharing
- b. Visi dan Misi Pelaksanaan KSS
  - Visi
  - Misi
- c. Arah Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan
- d. Tahapan Skala Prioritas (Cetak Biru) pelaksanaan KSS
  - Rencana Prioritas untuk periode I : 2010-2014
  - Rencana Prioritas untuk periode II : 2015-2019
  - Rencana Prioritas untuk periode III: 2020-2025

### OUTLINE GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS

#### IV. KERANGKA KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KSS

- a. Landasan hukum
- b. Kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan KSS
  - Tim Koordinasi Nasional KSS
  - Lembaga KSS
- c. Mekanisme koordinasi lintas kementerian
- d. Kerjasama dengan Stakeholder/Pemangku Kepentingan Lainnya
  - Parlemen
  - Pemerintah Daerah
  - Kadin/Swasta
  - IGO / OMS
  - Akademisi
  - Media
  - Tokoh agama, dll
- e. SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN KSS
  - a. APBN
  - b. Asing/Triangular
  - c. PPP
  - d. Swasta
  - e. Kerjasama Trilateral

### OUTLINE GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS

#### VI. PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN

- Menyebarluaskan praktik-praktik quick win yang sudah ada dan mengembangkan quick win untuk dilaksanakan ke depan sesuai dengan potensi Indonesia sesuai dengan model kerjasama yang dilaksanakan.
- Program-program unggulan yang akan diartikulasikan adalah program-program yang berada di bawah pilar-pilar yang diusulkan (ekonomi, teknik, sosial budaya dan IPTEK, namun juga perlu dipertimbangkan pilar politik)
- Menyusun indikator untuk penentuan program-program unggulan

#### VII. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

- Kerangka monitoring dan evaluasi (monev): indikator pengukuran pencapaian output.
- Waktu pelaksanaan monev
- Para pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan monev
- Output monev

### OUTLINE GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS

#### VIII. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014

- Misi KSS tahun 2011-2014: penekanan pada kerjasama ekonomi dan teknik.
- Fokus kawasan pelaksanaan kerjasama KSS dan program unggulan
- Agenda
  - Agenda I: Penguatan kelembagaan (struktur, tupoksi dan penyusunan SOP, termasuk penyusunan sistem informasi)
  - Agenda II: Penguatan kerangka legal; Revitalisasi landasan hukum pelaksanaan KSS.
  - Agenda III Pengembangan sistem Pendanaan Kegiatan
  - Agenda IV: Penguatan Pelaksanaan KSS
    - Penguatan pelaksanaan program berdasarkan bentuk kerjasama: bilateral, regional, multilateral, triangular
    - Penguatan pelaksanaan program berdasarkan jenis kerjasama: kerjasama teknik, ekonomi, social dan budaya, serta iptek.
  - Agenda V: Promosi dan publikasi

TERIMA KASIH

Back ground Paper  
untuk Penyusunan Grand Design  
KSS Indonesia

Pertemuan Lanjutan dari  
Bandung Meeting 14-15 Januari 2011

04/04/2011  
Drs. H. H. H. H.

Format Baru Grand Design

**Pokok Kesepakatan dari Pertemuan Bandung  
Tanggal 14-15 Januari 2011**

Disepakati Format baru

Di sepakati Visi dan Misi

Output 2 Dokumen

- Background paper
- Grand Design dan Cetak Biru

**Format Kesepakatan Pertemuan Bandung**

PENDAHULUAN

KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

SUMBER PENDAYAAN

PROGRAM UNGGULAN

MONITORING DAN EVALUASI

KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I:  
2011-2014

**BAB I  
PENDAHULUAN**

- LATAR BELAKANG
- DASAR HUKUM
- TUJUAN
- KERANGKA WAKTU
- CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP
  - KERANGKA HUKUM
    - KELEMBAGAAN
    - PENDANAAN
    - PROMOSI

**BAB II  
KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN**

- KONDISI LINGKUNGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN
  - LINGKUNGAN STRATEGIS INDONESIA
    - GLOBAL
    - REGIONAL
    - MULTILATERAL
- MODAL DASAR DAN PERAN INDONESIA
- PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

**BAB III**  
**PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN**

- PRINSIP-PRINSIP KSS
- VISI AN MISI
- TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
  - RENCANA PRIORITAS PERIODE I : 2010-2014
  - RENCANA PRIORITAS PERIODE II : 2015-2019
  - RENCANA PRIORITAS PERIODE III: 2020-2025

**PRINSIP-PRINSIP KSS**

**Landasan utama KSS Indonesia UUD 1945**

- kemandirian bersama (*collective self reliance*)
- Mempercepat pembangunan
- Menguatkan solidaritas

**POLITIS**

- Saling menghormati kedaulatan nasional
- Kepemilikan nasional (*ownership*)
- Kebijakan tergantungan (*interdependence*)
- Kesetaraan,
- Tidak-bersyarat (*non-conditionality*),
- Tidak memcampuri urusan dalam negeri
- Kemanfaatan bersama

Kerjasama pembangunan yang didasarkan pada kemitraan yang setara dan dilandasi oleh solidaritas.

**ADD EFFECTIVENESS**

Kerjasama pembangunan yang didasarkan pada kemitraan yang setara dan dilandasi oleh solidaritas

- Kepemilikan (Ownership)
- Selaras dengan kebijakan pembangunan
- Kemitraan inklusif
- Keunggulan komperatif
- Adaptabilitas
- Prioritas negara berkembang (demand driven)
- Berkelanjutan
- Fleksibilitas
- Akuntabilitas dan transparansi
- Monitoring and Evaluasi

**BAB IV**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

- LANDASAN HUKUM
- KERANGKA KELEMBAGAAN
- MEKANISME KOORDINASI
- KERJASAMA DENGAN PENDA
- KERJASAMA DENGAN OMS, SWASTA DAN PERGURUAN TINGGI

**Kerangka Hukum**

- Fokus pada KSS
- Peraturan Presiden dan Keppres

**Kelembagaan**

- Fragmented point of deliveries
- 3 opsi kelembagaan (Versi CEACOs UI)
- Amanat RPPM tentang entitas KSS
- Pertimbangan internal dan eksternal
- Memerlukan proses transisi menuju entitas KSS yang ideal
- Masa transisi melalui Forum *adhoc Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan*

**Mekanisme Koordinasi**

- Tahapan Perencanaan
  - 4 R/L utrama
  - No. PER. 005/H.PPN/06/2006 Bappenas
- Tahap Pelaksanaan
  - Tahap perundingan
  - Pra Pelaksanaan
  - Pelaksanaan
- Monitoring dan Evaluasi

#### Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

- Sister City/Propinsi
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pihak Luar Negeri

#### Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil, Swasta dan Perguruan Tinggi

#### BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

- APBN
- MITRA KERJASAMA
- SWASTA

#### APBN

- Strategi dan kebijakan keuangan negara yang di tempuh melalui upaya optimalisasi pengeluaran pemerintah.... RPJM 2010-2014
- Penanaman alokasi melalui anggaran yang lebih terpadu (*united budget*)
- Memperhatikan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

#### Mitra Kerjasama Internasional

- Bilateral dan Multilateral
- Kerjasama Triangular

#### Swasta

- Tidak cukup referensi mengenai keterlibatan swasta dalam pembiayaan KSS
- Perlu pendalaman mengenai skema pembiayaan dari swasta

#### BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

- Fokus pada KST
- Bagaimana menentukan Program unggulan dalam KENB
- Definisi dan kriteria program unggulan

## VII. MONITORING DAN EVALUASI

- Merupakan bagian dari perencanaan
- Cakupan dapat meliputi :
  - Kemanfaatan kerjasama bagi kepentingan nasional dan kementerian/lembaga yang melaksanakan kerjasama;
  - Kemanfaatan kerjasama bagi negara berkembang;
  - Tindak lanjut dari hasil kerjasama dan rancangan yang lebih luas;
  - Keterkaitan dengan program pembangunan
  - Bagaimana "sustainability" dari program tersebut
  - Daya terima (*adaptability*) dari program di negara peserta
  - Evaluasi teknis atas penyelenggaraan;
  - Bagaimana menjaga kesinambungan kerjasama.
  - Pembeltajaran yang di peroleh dari program tersebut.

## BAB VIII. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014

- Misi Kerjasama Selatan-Selatan tahun 2011-2014.
- Fokus kawasan dan Program Unggulan
  - 4 Kawasan
  - Program unggulan
- Agenda
  - Agenda I : Penguatan kelembagaan
  - Agenda II: Penguatan korangka hukum
  - Agenda III : Pengembangan Sistem Pendanaan Kegiatan KSS
  - Agenda IV: Penguatan Pelaksanaan Program-program Unggulan
  - Agenda V : Promosi dan Publikasi
  - Peta Jalan Agenda KSS Indonesia 2011-2014

**NOTULEN RAPAT**  
**PERTEMUAN TIM TEKNIS KSS**

Tempat : Nikko Hotel, Jakarta  
Tanggal : 16 Februari 2011  
Waktu : 10.00-17.00 WIB

**Notulen:**

- Pertemuan ini dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama membahas tentang kerjasama ekonomi dan sesi kedua membahas tentang skema pembiayaan.
- Pertemuan ini dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas) sebagai Ketua Tim Teknis.
- Pada pembukaan pertemuan ini, Pak Dewo menjelaskan secara singkat mengenai progres pelaksanaan KSS Indonesia dikarenakan beberapa peserta dari BKPM, LPEI dan Kementerian Perindustrian baru kali ini hadir, dan perkembangan dalam penyusunan Grand Design dan Sistem Informasi KSS Indonesia yang didukung oleh JICA yang memiliki pengalaman dalam menangani KSS serta prinsip-prinsip dan arah kebijakan pelaksanaan KSS Indonesia. Materi presentasi yang disampaikan oleh Pak Dewo seperti terlampir pada Lampiran 1.
- Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Adik Bantarso (lihat Lampiran 2) mengenai penyusunan Grand Design khususnya mengenai Kerjasama Ekonomi.
- Selama sesi diskusi, Djunari dari Kemendag menyatakan bahwa pada dasarnya Beliau sangat mengapresiasi Tim Perumus yang sudah memformulasi Grand Design ini. Pada dasarnya kerjasama ekonomi Indonesia masih terfokus pada pelaksanaan *free trade*, dan saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah pada peraturan yang membatasi export CPO. Indonesia bekerjasama secara regional dengan Malaysia untuk mengatasi kampanye negatif dari negara-negara Uni-Eropa mengenai isu ekologi yang menyatakan bahwa bahan baku bio fuel (CPO) tidak boleh didapatkan dengan melakukan penanaman sawit pada areal hutan tropis. Sementara dalam menghadapi harga karet yang rendah, Indonesia bersama-sama Malaysia dan Thailand menggunakan peraturan perdagangan Internasional untuk menstabilkan harga. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama merica dan kelapa yang terjadi antar negara-negara Asia-Pasifik, yang pada umumnya merupakan kerjasama berdasarkan komoditi.
- Pak Thalib dari KADIN mempertajam pembahasan mengenai kerjasama ekonomi dengan menjelaskan pengalamannya sebagai Wakil Ketua Komite Afrika KADIN dan G-15 (lihat lampiran3). Menurut beliau Indonesia sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan dengan negara-negara Selatan misalnya bekerjasama dengan FAO di Gambia, kegiatan Pelatihan bagi Petani di Madagaskar dan memberikan bantuan bagi Tanzania sejak tahun 1982, kerjasama di bidang agribisnis dan gula dengan Fiji, program UKM untuk bidang peternakan, kerjasama di bidang pertanian dengan Australia dan Belanda, dalam bidang minyak dan buah-buahan tropis dengan Malaysia, dalam bidang perdagangan, industri dan pariwisata dengan Mesir, dsb. Terkait dengan posisi Indonesia pada kerjasama Indian-Ocean Rim (EIOR ARC), Indonesia juga harus mengantisipasi dan mengembangkan lebih lanjut manajemen perbankan dan hal-hal lain terkait

dengan Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Hal lain yang diperlukan adalah untuk memperjelas tentang kepastian hukum dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. KADIN dalam waktu dekat juga akan memfasilitasi pengusaha muda dari Zimbabwe yang ingin mengetahui secara rinci mengenai pengembangan tekstil, perabotan, alat komunikasi, dsb. di Indonesia.

- Beberapa perusahaan Indonesia seperti Indofood, Indorama, Tjiwi-Kimia, Medco, dan sebagainya sudah berhasil masuk ke negara-negara Afrika. Indonesia juga sudah menandatangani MoU dengan SASOL, sebuah produsen bahan bakar sintetis dari Afrika Selatan pada akhir tahun 2009, begitu juga dalam bidang pertambangan. Selain itu, sebuah kerjasama dalam bidang pertanian sudah terjalin antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Namibia.
- Masalah yang dihadapi oleh Indonesia dengan negara-negara Asia-Pasifik tersebut adalah terkait dengan keterbatasan pengenalan produk, jarak ke negara yang dituju, jenis transportasi yang tersedia, imej, dan sebagainya.
- Ibu Natalia dari BKPM menjelaskan bahwa pada dasarnya saat ini kebijakan pemerintah masih dalam bentuk “*in ward looking*” belum berubah ke arah “*forward looking*”. Saat ini kerangka hukum untuk investasi Indonesia belum tersedia. Direktorat terkait sedang berupaya untuk membuat database mengenai data investasi yang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri. Banyak investor Indonesia sudah menanamkan investasinya di luar negeri. Beberapa MoU dengan India sebagai salah satu negara teragresif saat ini juga sudah ditandatangani, tetapi dilakukan secara “*in ward*”. Saat ini belum ada institusi yang memiliki data yang akurat mengenai total investasi yang sudah ditanamkan oleh investor Indonesia di luar negeri., bahkan, BI sebagai Bank Sentral pun hanya melakukan pencatatan mengenai lalu lintas valutenya, namun tidak mencatat untuk apa uang keluar tersebut digunakan. Salah satu cara yang paling efektif untuk berinvestasi di luar negeri adalah dengan melakukan promosi sambil melihat potensi pasar.
- Ibu Dyah dari Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa Kementeriannya sedang melaksanakan kerjasama dengan Mozambique dalam bentuk pelatihan agribisnis dan tekstil. Disamping itu, kerjasama dengan Palestina sudah dimulai sejak tahun lalu dan kerjasama lainnya dalam bidang pupuk tengah dilaksanakan oleh PUSRI bekerjasama dengan perusahaan pupuk di Teheran dalam membangun sebuah pabrik pupuk di Teheran karena Iran memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Hasil kunjungan Presiden ke India bulan Januari 2010 juga telah menghasilkan ditanda-tanganinya MoU untuk bekerjasama dalam bidang pupuk, gas, dan tambang batubara dengan India.
- Medi dari Kementerian Perindustrian menambahkan bahwa kerjasama dengan Palestina sudah dimulai sejak tahun lalu untuk kegiatan pelatihan mengenai pengelasan (*welding*). Tahun lalu 12 peserta dan tahun ini diperkirakan 10 orang peserta akan mengikuti pelatihan tersebut. Masalah dalam melakukan pelatihan ini adalah karena susahnyanya bagi orang Palestina untuk dapat keluar dari negara mereka. Terkait dengan kerjasama teknik dan kerjasama ekonomi, Beliau setuju bahwa pada dasarnya kerjasama teknik adalah bagian dari kerjasama ekonomi. Dalam kerjasama regional seperti ASEAN, dilakukan program kemitraan dalam bentuk kompensasi penurunan tarif. Contoh lainnya adalah dalam hal kerjasama dengan Korea, pada prinsipnya ada 18 bidang cakupan kerjasama, namun pihak Indonesia tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal dan akhirnya lebih banyak dipergunakan oleh negara mitra ASEAN lainnya.

- Kerjasama dengan Mozambik diawali dengan ketertarikan Mozambik dengan produk kapas Indonesia. Mozambik merupakan pintu masuk ke banyak negara Afrika. Dengan potensi kapasitasnya, Mozambik berkeinginan untuk melakukan ekspor-impor komoditi kapas dengan Indonesia dengan memberlakukan tarif nol untuk masuk dan keluar dari Indonesia.
- Pertemuan ke-empat D-8 di Bali menyepakati 11 bidang kerjasama. Iran mengusulkan untuk mewujudkan kerjasama teknik dengan melakukan “investasi bersama” antar negara D-8.
- Mr. Dewo mengingatkan untuk berhati-hati dalam memberikan pelatihan bagi negara-negara Afrika. Jika perlu “*franchising*” dalam bidang-bidang tertentu harus ditawarkan. Dalam kerjasama pupuk, kemungkinan Islamic Development Bank dapat memfasilitasi. Dalam konteks kerjasama ekonomi, Pemerintah Indonesia dapat membantu untuk mengkoordinasikan kerjasama tersebut, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh swasta.
- Peserta dari LPPI (Bank Exim) menginformasikan bahwa ada beberapa negara di Selatan yang termasuk dalam kategori negara dengan resiko tinggi. Karenanya, banyak Bank yang menolak untuk mendanai kegiatan di negara-negara tersebut. Misalnya, LC dari Iran selalu dihindari oleh pihak Bank. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara tersebut atau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator juga harus dilibatkan.
- Mr. Rendra (Direktorat Sosbud ONB, Kemenlu) menginformasikan bahwa pada tanggal 10-12 Februari 2011, Kemenlu telah menyelenggarakan sebuah pertemuan yang membahas tentang kerjasama ekonomi antar negara-negara berkembang, yang dihadiri juga oleh Pak Adik Bantarso sebagai *resource person*. Dan pada pertemuan tersebut Direktorat PPIH dan PELH yang akan menjadi lead untuk isu-isu kerjasama ekonomi. Beberapa input pada pertemuan tersebut juga sudah disampaikan kepada Pak Adik.
- Direktorat Afrika-Kemenlu mendapatkan anggaran khusus untuk program-program inisiatif untuk negara-negara Afrika di tahun 2011 ini dan sudah mensosialisasikannya dengan para pemangku – kepentingan terkait. Akses pasar ke negara-negara Afrika misalnya Nigeria merupakan tantangan baru bagi Indonesia, akan tetapi bea masuk ke Nigeria cukup besar yaitu sekitar 40%.
- Saat ini ada sekitar 10 investor Indonesia yang mengekspor produk mereka lewat Benin dan kemudian pendistribusian produk tersebut dilakukan lewat Benin ke negara-negara sekitarnya termasuk Nigeria. Saat ini tidak ada satu institusi pun yang memiliki data yang memadai tentang ekspor dan peluang investasi. Terkait dengan koordinasi dengan pihak swasta, Pemerintah Indonesia telah bertindak sebagai fasilitator agar pihak swasta tersebut dapat masuk ke pasar global. Namun, beberapa perusahaan swasta menolak untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia, misalnya ada beberapa perusahaan CPO yang sudah berhasil masuk ke negara-negara Afrika Barat.
- Pak Dewo menyarankan untuk mempergunakan forum-forum dan institusi yang ada, namun Pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan swasta untuk memberikan informasi mereka kepada Pemerintah.
- Pak Thalib menjelaskan bahwa dalam hal ini GSTP dapat dipergunakan. Pemerintah melalui Direktorat Perlindungan Hukum dapat membantu UKM dalam hal pembuatan kontrak. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk memfasilitasi pihak swasta terutama dalam hal

perlindungan hukum bagi UKM. Jika diperlukan, asosiasi di tingkat regional dapat dipergunakan untuk perlindungan.

- Ibu Dinur (JICA) menjelaskan bahwa JICA merespon secara positif usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan modalitas kerjasama luar negeri Indonesia. Belajar dari pengalaman Jepang, pada awalnya dasar kerjasama ODA Jepang adalah kerjasama ekonomi, namun saat ini Jepang lebih fokus pada kerjasama teknik. JICA bertindak sebagai fasilitator untuk meningkatkan strategi dan kebijakan Indonesia. Kerjasama Indonesia masih harus didasarkan pada prinsip global seperti solidaritas, kepercayaan, tulus, saling menghargai, dapat menerima dan kepercayaan diri, sama halnya seperti ketika Indonesia diposisikan sebagai negara penerima. Indonesia harus lebih berhati-hati untuk melaksanakan kerjasama ekonomi, karena untuk negara-negara berkembang, harus dimulai dengan sikap yang baik, perlahan tapi berkelanjutan. Kedua, konsensus antara KADIN dan instansi terkait harus ditetapkan secara seksama dan harus dapat diterima oleh seluruh instansi. Pada awalnya ODA Jepang juga terfragmentasi, tersebar di MOFA, METI, Badan Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, dsb. Semua instansi terkait harus memiliki persepsi yang sama dan harus memiliki pola kerjasama yang telah disepakati untuk membawa nama dan bendera Indonesia di luar negeri. Ketiga, kerjasama tersebut harus bersifat unik atau spesifik agar dapat diterima di pasar global. Ada beberapa akses yang telah tersedia, seperti Kelompok-15, Kelompok-20, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama tidak harus dilakukan oleh sebuah lembaga saja. Keempat, Pemerintah Jepang juga mengkoordinasikan keterlibatan sektor publik dan swasta. Jadi, ada alur kerjasama pemerintah, alur kerjasama semi pemerintah dan alur kerjasama swasta. Jepang memiliki *Satgas (Task Force)* untuk ODA pada Kedutaan di berbagai negara. Investasi luar negeri Indonesia juga harus dipromosikan, termasuk kemungkinan bahwa Bank Exim dapat memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang lainnya, seperti ketika Indonesia membangun Pabrik Nikel atau Krakatau Steel yang dibiayai oleh Bank Exim Jepang. Kelima: Dalam sektor jasa, JICA Indonesia memberikan pelatihan pembangunan jalan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Timor Leste. Kerjasama teknik dapat fleksibel untuk ikut menjadi bagian dari kerjasama ekonomi. Sebagai contoh, program *micro-finance* untuk negara-negara Afrika menghadapi jalan buntu, karena Indonesia belum siap belum untuk program tersebut. Jika Pemerintah RI tidak akan menindaklanjuti, Malaysia akan masuk ke sektor ini. Micro-finance ini bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi Indonesia di masa mendatang. Pada dasarnya forum ini jauh lebih maju dari apa yang diharapkan oleh JICA. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Indonesia akan dipercaya oleh negara-negara berkembang. Membangun kepercayaan juga bisa dilakukan melalui kerjasama triangular. Negara-negara Utara tidak akan menjalin kerjasama tanpa didasari oleh kepercayaan, oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil manfaat untuk membangun kepercayaan melalui kerjasama triangular, sebagai komplemen dari kerjasama Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-Selatan.
- LPPI menginformasikan bahwa pada dasarnya perbankan diperkenankan untuk membiayai perseorangan atau perusahaan di luar negeri. Misalnya, proyek WIKA di India dan kereta api di Bangladesh. Pada prinsipnya bila proyek tersebut layak, maka boleh didanai.
- Sesi II dimulai jam 2 siang dan dibuka dan dipimpin juga oleh Pak Dewo Broto sebagai Ketua Tim Teknis, mengulangi presentasi yang sama dengan yang di pagi hari dan kemudian dilanjutkan

dengan presentasi mengenai Skema Pembiayaan dan Program Unggulan oleh Pak Adik Bantarso seperti terlihat pada Lampiran Notulen ini.

- Pak Andy dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa dalam pertemuan sebelumnya ia menginformasikan bahwa Kementerian Pertanian akan mengalokasikan bantuan terkait KSS dalam bentuk pengiriman ahli dan pelatihan pada tahun 2011 tetapi tampaknya tidak disetujui oleh Depkeu. Masalahnya adalah karena tidak jelasnya mata anggaran untuk kegiatan KSS, terutama untuk bantuan traktor tangan, selalu tidak jelas boleh dan tidaknya. Terkait dengan program unggulan, adalah program yang bisa dijual oleh Kemtan.
- Pak Dewo menjelaskan bahwa jika anggaran tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan, harus diperiksa apa alasan di balik itu. Karenanya perlu menerapkan anggaran berbasis kinerja mulai saat ini. Bappenas sedang menyiapkan RKP 2012, dan diharapkan akan selesai pada bulan Maret 2011. Jadi, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengajukan program terkait KSS. Untuk program dengan mitra asing, JICA telah memberi lampu hijau bagi kerjasama tripartit seperti *micro-finance*. Untuk sektor swasta, mungkin bisa lewat program CSR sebagai bagian dari sarana promosi pihak swasta.
- Fachrurozi (Setneg) menjelaskan bahwa biasanya Kementerian Keuangan akan meminta untuk disertai evident, dan akan melihat instansi mana yang berhak untuk mengajukan program tersebut. Harusnya semua program yang diajukan oleh K/L terkait dengan KSS harusnya dimasukkan dalam satu keranjang, karena akan membutuhkan dana yang cukup besar dan akan membebani anggaran K/L jika dititipkan pada K/L. Dalam pengajuan anggaran, RKP adalah suatu keharusan. Masalahnya adalah adanya program antisipasi yang harus dilaksanakan di tengah-tengah tahun anggaran dan belum masuk di dalam APBN. Sementara momen yang dibutuhkan tidak sesuai dengan periode proses revisi APBN. Pengelolaan anggaran umumnya biasanya sudah memiliki standar, maka perlu adanya mekanisme yang spesifik untuk KSS. Untuk program unggulan, perlu ditetapkan kriteria atau indikatornya dan masing-masing K/L akan membuat daftar program unggulan mereka, dan untuk *quick win* akan dievaluasi dan diputuskan oleh Tim Pengarah.
- Mr Ade (Bappenas) menginformasikan bahwa pada dasarnya anggaran SSC dalam APBN hanya 18%. Maka forum regional dan kawasan dan negara-negara maju diharapkan untuk ikut mendanai SSC Indonesia. Peraturan yang ada hanya mengatur peran Indonesia sebagai negara penerima bukan sebagai negara donor. Oleh karena sudah ditetapkan dalam RPJM, maka perlu untuk memformulasi peraturan untuk memfasilitasi peran Indonesia sebagai donor.
- Bu Zurlaini dari Biro Perencanaan Departemen Perindustrian menjelaskan bahwa peran Indonesia sebagai donor dalam KSS adalah tantangan baru, karena pada dasarnya tidak mudah untuk melaksanakan sebuah kerjasama yang *accountable*. Terkait dengan anggaran, perlu untuk menyiapkan dasar hukumnya. Dan itu harus jelas antara bantuan sosial atau teknis. Jika pembiayaan dari APBN sulit, mungkin bisa didanai oleh swasta, dengan memfasilitasi masuknya produk-produk potensial ke negara-negara Selatan. Sebagai contoh, di industri rotan, Pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara selatan. Disarankan agar Bappenas atau Kemkeu untuk terlibat dalam mengkoordinasikan program-program KSS.

- Pak Dewo menjelaskan bahwa dasar hukum, *quick win* dan kerangka kelembagaan diperlukan agar KSS dapat didanai oleh APBN. Di sisi pendanaan perlu untuk melibatkan Bank Exim. Tim Koordinasi berperan dalam pengkoordinasian KSS selama masa transisi.
- M. Thohir (Kementerian Sosial): Kemosos telah mengusulkan TCTP untuk Program Kejuruan pada bulan Februari 2010 untuk tahun anggaran 2011 melalui Setneg dan Bappenas. Namun sampai sekarang, tidak ada informasi apakah usulan tersebut disetujui oleh JICA atau tidak.
- Dinur (JICA): Usulan program NVRC di Cibinong tidak lulus *screening*, karena JICA punya step yang jelas untuk tiap program: proyek hibah, kerjasama teknik, proyek exit. Untuk NVRC, karena telah dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun (2 term), harus exit. Biasanya suatu proyek hanya untuk 1 term, kecuali untuk kondisi tertentu. Hal ini berbeda dengan PENS (politeknik) di Surabaya dapat diperpanjang sampai dengan 3 term karena ada permintaan khusus dari negara-negara penerima bantuan. Biasanya program-program tersebut ada kaitannya dengan program serupa pada JICA di negara-negara penerima. Anggaran JICA untuk Indonesia cenderung menurun, dan sebagian besar dialokasikan ke negara-negara Afrika. Karenanya program akan dihubungkan dengan sektor terkait. Kerjasama tripartit antara Indonesia dan JICA selalu merujuk pada daftar di bluebook, meskipun sulit karena yang menerima manfaat dari program KSS tidak hanya Indonesia. Saat ini, program-program tersebut melekat pada program di Setneg. Dari sisi JICA, sesuai persyaratan kode etiknya, harus ada kemauan kuat dari Indonesia dan dicampur dengan kegiatan yang didanai oleh kerjasama triangular atau hanya didanai oleh Indonesia sendiri.
- Pak Dewo: Perencanaan harus dilakukan secara holistik. *Quick win* haruslah kegiatan KSS yang dapat dijual dengan keunggulan komparatif, yang layak untuk dibiayai oleh donor, mungkin memiliki nilai tambah atau merupakan program unggulan. Sebagai contoh, inseminasi buatan, yang benar-benar dikuasai oleh Indonesia dan dapat diadopsi dalam kerjasama selatan-selatan. Kegiatan baru akan dimasukkan dalam *whitebook*.
- Mr. Adik Bantarso: apa pun yang akan diusulkan untuk program KSS harus menjadi sesuatu yang dapat dikenang dalam 100 tahun. Indonesia saat ini sedang membuat rencana tindak untuk tahapan 2014 dan tinggal landas di tahun 2025. Indonesia punya fasilitas yang disebut *center of excellent*, tapi bagaimana cara untuk merevitalisasi fasilitas tersebut. Program unggulan dalam kerjasama ekonomi sebagian besar berbasis produk, bukan berbasis program. Karena RKP harus selesai pada bulan Maret 2011, berarti waktu tinggal kurang dari 2 bulan untuk mendapatkan konsensus.
- Untuk program unggulan, Kementan telah mengembangkan program pelatihan di Tanzania dibiayai oleh asosiasi Petani dan diikuti dengan program pelatihan yang dibiayai oleh JICA. Dalam pelatihan tersebut, mungkin kita bisa mempromosikan mesin pertanian Indonesia dan peralatan seperti traktor tangan.
- Zurlaini: Dalam mendesain program untuk negara-negara penerima bantuan, lebih baik untuk membuat daftar kebutuhan negara-negara penerima bantuan.
- Rendra: Di Kemelu ada kegiatan yang melakukan inventarisasi kebutuhan negara-negara selatan, namun belum sempat dikompilasi.
- Mr Fahrurozi: Ada masalah dengan pencatatan akuntansi hibah, berkaitan dengan penyaluran langsung anggaran hibah kepada instansi pelaksana. Hal ini tidak benar menurut Kementerian Keuangan. Setiap hibah harus dicatat. Prosedur harus jelas. Dalam kaitan dengan usulan dari

Kementerian Sosial, untuk Palestina masih diperlukan dan mengenai pusat pelatihan di Tanzania ini tidak berfungsi karena tidak tersedianya anggaran yang memadai.

- Ms Theodora (BKKBN) menyatakan bahwa terkait dengan mekanisme pembiayaan, selama ini BKKBN dapat dapat mengalokasikan anggaran untuk KSS berdasarkan 4 program utama di BKKBN. Namun, karena tidak ada kejelasan payung hukumnya, sulit untuk mempertahankan anggaran tersebut. TCTP program yang dibiayai oleh JICA telah berakhir sejak tahun lalu. Permintaan masih tinggi, tetapi sulit untuk mencari donor. Saat ini, ada surat dari OENB Kemlu agar BKKBN mempersiapkan proposal yang ditujukan kepada Perez Guerro Trust Fund. Tahun lalu Setneg juga meminta pemetaan, tetapi tidak ada hasil sejauh ini. Tampaknya untuk kegiatan KSS, Pemerintah perlu memiliki sekretariat KSS yang tersendiri untuk mengkoordinir semua kegiatan.
- Ms Dinur (JICA): Pembangunan pusat pelatihan pertanian di Tanzania adalah murni dibiayai oleh Yayasan Petani Indonesia. Melihat potensinya, maka kemudian JICA mendukung mereka dengan memfasilitasi adanya pelatihan. Indonesia karena PDB mungkin masih belum dapat mendukung wajib, tetapi Indonesia dapat melakukan uji coba di membantu sebagai Donor. Oleh karena itu, program yang diusulkan harus *eye catching*, dan harus diputuskan di forum mana bantuan akan diberikan: ASEAN atau OKI (Palestina atau Afganistan atau Timor Leste, dsb). Indonesia telah mengikrarkan 1,000 bantuan bagi Palestina hingga dengan 2013, dan sampai sekarang masih sekitar 126 bantuan, mungkin Palestina dapat menjadi salah satu *quick win*, sedangkan kesinambungan program juga harus tetap diperhatikan. Tidak perlu menetapkan terlalu banyak program di awal.
- Berdasarkan hasil diskusi, Pak Dewo akhirnya memutuskan usulan untuk *quick win*:
  - Revitalisasi Pusat Pelatihan Pertanian di Tanzania dan Gambia
  - Tablet Keluarga Berencana untuk Lelaki
  - Untuk Palestina: kerjasama teknis dengan NAM Center
  - Obat-obatan Herbal

**DAFTAR HADIR**  
**PERTEMUAN KOORDINASI PENDANAAN, MEKANISME PENYALURAN**  
**DAN PROGRAM UNGGULAN KSS**  
**JAKARTA, 16 FEBRUARI 2011**

Tempat : R. Rapat Jade Hotel Nikko Jl M.H. Tamrin Jakarta  
 Waktu : 14.00 - 16.00 WIB

No.	Nama	Instansi & Jabatan	No. HP	Tanda Tangan
1	Dewo Broto Jales P	Dir. Multi, Bappenas		
2	M. Iqbal	KTLN Setneg	0815 7817 0197	
3	Noer Dhidaid	Protek KLN Kemkes	081770666723	
4	Ade Kurniyo	Bappenas	0857 137555 52	
5	Dr. R. SANDORO	Konsultan	08166910809	
6	Esi B. Swarga	ECBAM	081290581239	
7	Aquilia Yonno	Multi - Bappenas		
8	Miranda	ECBAM - Multi	0807771530	
9	Rafiana	MULTI - Bappenas	08562217593	
10	Theresia N	Multi - Bappenas	08575777587	
11	Theodora P	PULIN - BKKBN	08161384408	
12	M. Raml.	Biro Perencanaan KLR	081384019567	
13	Rendra K.	Dir. Sokal & OINAS	081302215683	
14	Lingga	JICA	0811928161	
15	Dinar	JICA	081-1945-819	
16	Christina Sudira	NAMCESTE	08150502574	
17	Rosyana Dewi	Kem. KUKM / Rosen	081802333826	
18	Andy Jaya Dewasa	PKLN - KEMENAN	0818654476	
19	Ivan Novianto	KTLN - SETNEG	08129109220	
20	AMRI K.S.	— n —	0811 90 26 79	
21	Zulaini	B. Perencanaan Kementerian	08161646516	
22	Eka K. L.T	— n —	081310795475	
23	Dumaria Sihandjij	PKSI, BKF, Kemendagri	081316669383	
24	Teguh P	PKLN PU	08132001303	
25	Mamang A.B	Biro PKLN Kemendagri	08199423287	
26	Togisan	Biro PKLN, Kemendagri	08190204227	
27	Muhammad Fahrerozi	Biro KTLN, Setneg	08159471837	
28	Markwin H	Pusat KLN, Kantoran	081586194875	
29	Tuti Harlun	Biro PKLN, KLLI	858 0110	
30	Budiman A.	PT. Indokoci Int.	084809374	
31	TR. HENRI N	Pusat Kerjasama Inf. Kambing	08177548P	
32	KENDRO DRADJAT	PKI, Kemkominfo	0818800853	
33	Lutfi Akromi	Psikologi - Bappenas	081319610077	
34	M. TAHIR	Biro Perencanaan KEMENSOS	0817 857 164	
35	Saron Rasyana	— n —	08228558096	





**USULAN VISI DAN MISI GRAND DESIGN DAN BLUE PRINT KSS**

**VISI KSS INDONESIA:**  
*"Better Partnership for Prosperity"*  
*"Kemitraan yang Lebih Baik untuk Kesejahteraan"*

**MISI KSS INDONESIA:**

- Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional
- Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Negara-Negara Selatan
- Mengembangkan kerjasama teknik, sosial, budaya dan iptek dengan Negara-Negara Selatan
- Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional



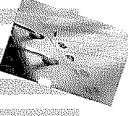
**PENGEMBANGAN GRAND DESIGN, BLUE PRINT DAN SISTEM INFORMASI KSS**

- Grand design dan blue print merupakan satu dokumen yang terintegrasi
- Kerangka waktu Grand Design 2010-2025, sedangkan kerangka waktu blue print 2010-2014
- Ruang lingkup Grand Design dan Blue Print mencakup: Landasan Hukum, Kelembagaan, Pendanaan, Program-Program Unggulan, Mekanisme Monitoring dan Evaluasi, serta Arah Kebijakan.
- Landasan Hukum: menjelaskan dasar hukum yang memberikan kewenangan dan amanat pelaksanaan KSS di Indonesia
- Arah Kebijakan dan Strategi: mendetailkan arah kebijakan KSS dalam RPJMN dan renstra polgri.



**OUTLINE GRAND DESIGN KSS INDONESIA**

- PENDAHULUAN
- KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN
- PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN
- KERANGKA KELEMBAGAAN
- SUMBER PEMBIAYAAN
- PROGRAM UNGGULAN
- MONITORING DAN EVALUASI
- KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014



**OUTLINE GRAND DESIGN KSS INDONESIA**

- PENDAHULUAN**
  - Latar Belakang
  - Dasar Hukum dan Amanat Pengembangan KSS
  - Tujuan penyusunan Grand Design dan Blue Print KSS
  - Kerangka Waktu
  - Cakupan dan Ruang Lingkup Pengembangan KSS
    - Kerangka Hukum
    - Kelembagaan
    - Pendanaan
    - Program
- KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA PELAKSANAAN KSS**
  - Kondisi Lingkungan Strategis KSS
    - Internal (Lingkungan Strategis Indonesia)
    - Eksternal
      - Bilateral
      - Regional
      - Multilateral
      - Global
  - Modal Dasar dan Peran Penting Indonesia dalam Pelaksanaan KSS
  - Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi



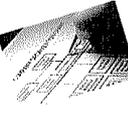
**OUTLINE GRAND DESIGN KSS INDONESIA**

- PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS**
  - Prinsip-Prinsip Pelaksanaan KSS
    - Kepentingan Nasional
    - Aid effectiveness
    - Solidaritas
    - Transparansi
    - Sustainability
    - Inklusif
    - Knowledge sharing
  - Visi dan Misi Pelaksanaan KSS
    - Visi
    - Misi
  - Arah Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan
  - Tahapan Skala Prioritas (Cetak Biru) pelaksanaan KSS
    - Rencana Prioritas untuk periode I : 2010-2014
    - Rencana Prioritas untuk periode II : 2015-2019
    - Rencana Prioritas untuk periode III: 2020-2025



**OUTLINE GRAND DESIGN KSS INDONESIA**

- KERANGKA KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KSS**
  - Landasan hukum
    - Fokus pada Kerjasama Selatan-Selatan
  - Kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan KSS
    - Membentuk Entitas Kelembagaan KSS yang Ideal
    - Diperlukan transisi menuju entitas lembaga KSS Ideal
  - Mekanisme koordinasi lintas kementerian
  - Kerjasama dengan Stakeholder/Pemangku Kepentingan Lainnya
    - Parlemen
    - Pemerintah Daerah
    - Yadiv/Swasta
    - NGO / OMS
    - Akademisi
    - Media
    - Tokoh agama, dll
- SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN KSS**
  - APBN
  - Bilateral / Multilateral
  - Triangular dan Trilateral
  - PPP
  - Swasta



### OUTLINE GRAND DESIGN KSS INDONESIA

**VI. PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN**

- Menyebarluaskan praktik-praktik quick win yang sudah ada dan mengembangkan quick win untuk dilaksanakan ke depan sesuai dengan potensi Indonesia sesuai dengan model kerjasama yang dilaksanakan.
- Program-program unggulan yang akan diartikulasikan adalah program-program yang berada di bawah pilar-pilar yang diusulkan (ekonomi, teknik, sosial budaya dan IPTEK, namun juga perlu dipertimbangkan pilar politik)
- Menyusun indikator untuk penentuan program-program unggulan

**VII. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI**

- Kerangka monitoring dan evaluasi (morev): Indikator pengukuran pencapaian output.
- Waktu pelaksanaan morev
- Para pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan morev
- Output morev

### OUTLINE GRAND DESIGN KSS INDONESIA

**VIII. KEBIAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014**

- Misi KSS tahun 2011-2014: penekanan pada kerjasama ekonomi dan teknik.
- Fokus kawasan pelaksanaan kerjasama KSS dan program unggulan
- Agenda
  - Agenda I: Penguatan kelembagaan (struktur, fungsi dan penyusunan SOP, termasuk penyusunan sistem informasi)
  - Agenda II: Penguatan kerangka legal; Revisi/landasan hukum pelaksanaan KSS.
  - Agenda III: Pengembangan sistem Pendanaan Kegiatan
  - Agenda IV: Penguatan Pelaksanaan KSS
    - Penguatan pelaksanaan program berdasarkan bentuk kerjasama: bilateral, regional, multilateral, triangular
    - Penguatan pelaksanaan program berdasarkan jenis kerjasama: kerjasama teknik, ekonomi, sosial dan budaya, serta iptek.
  - Agenda V: Promosi dan publikasi

### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KSS

Dalam mengenal pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan sangat penting dalam proses penyusunan blue print KSS, terutama dalam hal pemelaksanaan program unggulan dan sebagai nilai jual di forum internasional

Sampai dengan saat ini, belum terdapat sistem informasi terintegrasi mengenai pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan yang telah dilakukan oleh Indonesia

Proses pengembangan sistem informasi KSS dibantu oleh konsultan dan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan grand design (Januari – Maret 2011)

Sistem Informasi KSS direncanakan akan diinstal di server Bappenas, dan dikoneksikan (link) dengan website Bappenas

### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KSS

Jan 2011      Jan-Feb 2011      Jan-Feb 2011      Feb-Mar 2011      Akhir-Maret 2011

Kontrak Konsultan      Stock Taking      Pengembangan Database      Entri data dan uji coba      Launching database KSS

- Beberapa K/L telah menngisi dan mengembalikan data kegiatan KSS kepada Direktorat Pendanaan LN Multilateral
- Tim Konsultan telah mulai melakukan stock taking data melalui kunjungan ke instansi (K/L)
- Sistem informasi yang dikembangkan mencakup:
  - Data program Kerjasama Selatan-Selatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga
  - Expert/ Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan
  - Kawasan dan negara penerima manfaat
  - Alokasi anggaran dalam pelaksanaan KSS yang dapat berasal dari APBN dan/atau donor
- Sistem Informasi akan ditampilkan dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia)
- Proses updating sistem informasi akan dilakukan secara online oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pelaksana

### FLOWCHART SISTEM INFORMASI KSS

```

    graph TD
      DB[DATABASE KSS] --> K[KERJASAMA]
      DB --> L[KELAYAKAN]
      DB --> R[REPORT]
      DB --> M[MONITORING DAN EVALUASI]
      
      K --> B[Benefit Kerjasama]
      K --> P[Program]
      K --> K[Kejasama]
      K --> T[Kejasama]
      K --> P[Perdagangan]
      
      L --> LK[Lingkup Kerjasama]
      L --> B[Benefit]
      L --> M[Misi]
      
      R --> D[Deskripsi]
      R --> E[By Country]
      R --> P[By Program]
      R --> B[By Industry]
      R --> R[By Region]
      
      M --> LK[Lingkup Kerjasama]
      
      subgraph Keterangan
        M[M]
        B[Benefit]
        B2[By]
        R[Region]
      end
  
```

- Sistem Informasi dilengkapi dengan fasilitas untuk search, sortir, dan upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan

### TINDAK LANJUT

16 Feb 2011      22 Feb 2011      28 Feb 2011      Feb 2011      akhir Maret 2011

Series Meeting dengan K/L dan FGD Draft ke-2      Laporan Kepada Tim Pengarah KSS      Regional Workshop GIZ      Stock Taking dan Pengembangan Sistem Informasi      Seminar Nasional dan Launching database KSS

**Membangun dan Memperkuat  
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia**

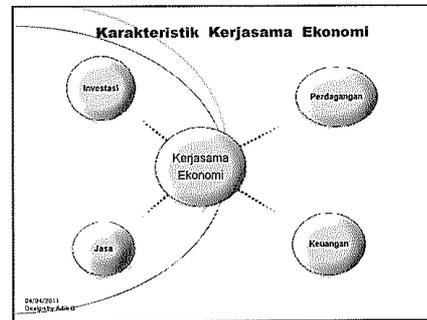
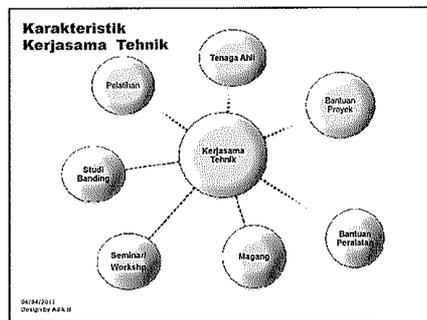
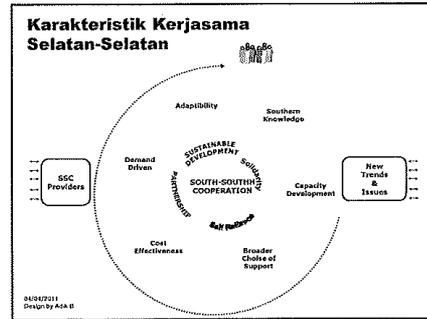
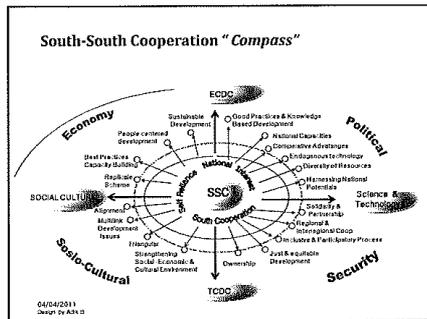
**Pendanaan, Mekanisme Penyaluran  
dan Program Unggulan**

**Pertemuan Koodinasi dan Konsultasi  
Tim Koordinasi KSS**

**Hotel Nikko  
16 Februari 2011**

**Grand Design  
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia**

04/04/2011  
Design: AA&B



### RASIONAL PENYUSUNAN

- PJM 2010-2014
- Hasil Kajian CEACOS UI "Arah Kebijakan Indonesia Dalam kerjasama Selatan-Selatan "
- Berbagai Sidang Internasional yang menekankan pentingnya Kerjasama Selatan-Selatan...."Acra Agenda of Action"
- Munculnya berbagai kecenderungan dan tantangan baru dalam KSS
- Peran Indonesia ke depan ...anggota G-20... Ketua ASEAN 2011
- Koordinasi Internal ....fragmentasi pelaksanaan KSS

### KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

- Pendekatan Holistik .... semua aspek KSS
- Lingkungan strategis pada tingkat nasional dan internasional
- Peran Indonesia pada masa lalu, saat ini dan ke depan
- Posisi dan peran Kelembagaan yang ada dan visi serta bentuk kelembagaan ke depan
- Aspek koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi
- Program dan kapasitas yang saat ini ada dan bagaimana penguatan kapasitas dan program KSS Indonesia ke depan
- Kerjasama horizontal antar negara berkembang dan vertikal antar kementerian/lembaga dalam KSS Indonesia
- Pemahaman mengenai KSS Indonesia

### Tujuan Grand Design KSS Indonesia

#### Memperkuat , meningkatkan dan memperluas KSS Indonesia

- Kerangka hukum
- Kelembagaan
- Koordinasi
- Program KSS
- Pembiayaan
- Promosi
- Informatisasi sistem

#### Rumusan kebijakan KSS Indonesia yang berskala Internasional

- Menjawab berbagai tantangan dan kecenderungan baru yang muncul
- Memerlukan tantangan dan global isu dengan mengidentifikasi peluang baru
- Program yang mendapat penemuan luas di negara berkembang
- Berbasis pada keterampilan dan pengalaman dalam pembangunan yang dapat di "Share"

#### Rumusan aksi

- Langkah tidak dalam memperkuat, meningkatkan dan memperluas KSS Indonesia

### Format Grand Design Nasional KSS Indonesia

#### BAB I PENDAHULUAN

#### BAB II KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN

#### BAB III PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB IV KERANGKA KELEMBAGAAN

#### BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

#### BAB VI PROGRAM UNGGULAN

#### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### BAB VIII KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE II: 2012-2014

### BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- DASAR HUKUM
- TUJUAN
- KERANGKA WAKTU
- CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP
  - KERANGKA HUKUM
  - KELEMBAGAAN
  - PENDANAAN
  - PROMOSI

### BAB II KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN

- KONDISI LINGKUNGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN
  - LINGKUNGAN STRATEGIS INDONESIA
    - GLOBAL
    - REGIONAL
    - MULTILATERAL
  - MODAL DASAR DAN PERAN INDONESIA
  - PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

**BAB III**  
**PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN**

- PRINSIP-PRINSIP KSS
- VISI AN MISI
- TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
  - RENCANA PRIORITAS PERIODE I : 2010-2014
  - RENCANA PRIORITAS PERIODE II : 2015-2019
  - RENCANA PRIORITAS PERIODE III: 2020-2025

**PRINSIP-PRINSIP KSS**

Landasan utama KSS Indonesia UUD 1945

- Kemandirian bersama (*collective self reliance*)
- Mempercepat pembangunan
- Memperkuat solidaritas

**POLITIK**

- Saling menghormati kedaulatan nasional
- Kepemilikan nasional (*ownership*)
- Kestidak tergantungan (*independence*)
- Keadilan,
- Tidak-beryarat (*non-conditionality*),
- Tidak menampung urusan dalam negeri
- Konsultasi bersama

Kerjasama pembangunan yang didasarkan pada kemitraan yang setara dan dilandasi oleh solidaritas.

**AID EFFECTIVENESS**

Kerjasama pembangunan yang didasarkan pada kemitraan yang setara dan dilandasi oleh solidaritas

- Kepemilikan (*Ownership*)
- Selaras dengan kebijakan pembangunan
- Kemitraan inklusif
- Keunggulan komparatif
- Adaptabilitas
- Prioritas negara berkembang (*demand driven*)
- Berkelanjutan
- Fleksibilitas
- Akuntabilitas dan transparansi
- Knowledge sharing
- Monitoring and Evaluasi

**Tahapan dan Skala Prioritas Grand Design**

- Sesuai dengan tahapan RPJP 2010-2025
- Dengan tahapan lima tahunan agar arah, tujuan dan sasaran KSS Indonesia dapat tercapai dengan baik

**BAB IV**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

- LANDASAN HUKUM
- KERANGKA KELEMBAGAAN
- MEKANISME KOORDINASI
- KERJASAMA DENGAN PEMDA
- KERJASAMA DENGAN OMS, SWASTA DAN PERGURUAN TINGGI

**Landasan Hukum**

Fokus pada Kerjasama Selatan-Selatan  
Bentuk Kerangka Hukum : Peraturan Presiden

**Payung bagi Aspek**

- Kelengkapan yang dapat mengkoordinir, memfasilitasi dan mengsinergikan berbagai program dan kegiatan KSS
- Kebijakan yang terkait dengan peranan dan arah KSS Indonesia sebagai pelengkap kebijakan politik luar negeri dan perdagangan internasional
- Pembiayaan KSS yang bersumber dari APBN dan sumber lain baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri
- Prosedural & Mekanisme yang terkait dengan ketentuan kerjasama dan pembelian bantuan

### Mekanisme Koordinasi

- Tahapan Perencanaan
- Tahap Pelaksanaan
  - Tahap perundingan
  - Pra Pelaksanaan
  - Pelaksanaan
- Monitoring dan Evaluasi

### MEKANISME KOORDINASI

Tahapan	Keterlibatan Kementerian/Lembaga	Mekanisme Koordinasi	Melalui
Perencanaan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Sekretariat Negara 3. Depdiknas 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian/Lembaga terkait	1. Perencanaan program dan kegiatan 2. Penyiapan anggaran, rencana pelaksanaan 3. Sosial Perencanaan	Duta P2M Program KSS Indonesia
Perundingan Kesepakatan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Sekretariat Negara 3. Depdiknas 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian/Lembaga terkait	Perundingan bilateral	Manuskrip Kesepakatan
Pelaksanaan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Sekretariat Negara 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian/Lembaga terkait	1. Memastikan ketepatan prosedur/kegiatan pelaksanaan 2. Sektoral/kegiatan paralel 3. Kolaborasi/koordinasi	1. Pihak Organisasi 2. Pihak Organisasi 3. Berbasis 4. Terintegrasi/koordinasi program
Evaluasi & Monitoring	1. Kementerian Luar Negeri 2. Sekretariat Negara 3. Depdiknas 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian/Lembaga terkait	1. Memastikan ketepatan monitoring dan evaluasi 2. Menjadikan mekanisme monitoring & evaluasi	Laporan/raport/hasil pelaksanaan KSS

### Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

- Salah satu pola untuk meningkatkan KSS
- Bentuk : Sister City/Provinces
- Telah di lakukan oleh beberapa Kota/Propinsi
- Mendorong pengenalan, promosi dan perluasan produk lokal dan investasi
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pihak Luar Negeri

### Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat Sipil, Swasta dan Perguruan Tinggi

#### Pendorong Kerjasama Selatan-Selatan

- Membantu membangun ketahanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan terutama masyarakat akar rumput;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
- Memperluas akses masyarakat terhadap berbagai informasi
- Membangun alternatif solusi
- Memperkuat kapasitas masyarakat
- Menyebarkan berbagai pengetahuan dan "best practises".

### BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

- APBN
- MITRA KERJASAMA
- SWASTA

### APBN

Kunci utama keberhasilan KSS Indonesia adalah ketersediaan dana pemerintah

- Strategi dan kebijakan keuangan negara yang di tempuh melalui upaya optimalisasi pengeluaran pemerintah... RPJM 2010-2014
- Penajaman alokasi anggaran agar dapat lebih terarah dan terpadu
- Pengaturan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan Kerjasama Selatan-Selatan yang bersumber baik dari dana APBN maupun dari pihak mitra pembangunan dan pemberi bantuan
- Meningkatkan dan memperkuat tata kelola keuangan Kerjasama Selatan-Selatan melalui panduan mekanisme yang baku
- Memperhatikan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

## SUMBER PEMBIAYAAN

### Bilateral

- Berdasarkan "cost Sharing"
- Sepenuhnya dari Indonesia

### Multi Lateral

- Perez Guerero Trust Fund
- UNDP Trust Fund
- Badan PBB lain
- Organisasi Internasional (OKI, G-15, D-8)

### Triangular Cooperation

- Segi tiga Indonesia-negara berkembang-mitra internasional
- Segitiga Indonesia-negara berkembang-negara berkembang
- Segitiga Indonesia-negara berkembang-lembaga pembiayaan internasional

## SUMBER PEMBIAYAAN

### SWASTA DAN PERBANKAN

- Dana CSR
- Lembaga Pembiayaan
- Perbankan

## BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

- Fokus pada Kerjasama Teknik dan Kerjasama Ekonomi
- Program yang mempunyai *multipier effect* dan menjadi katalis dalam proses pembangunan.
- Keunggulan komparatif Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak dari negara Selatan seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan ketahanan pangan.
- Program yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan produktivitas nasional.
- Program yang mengandung proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta mengandung solusi yang dapat berpalansi dengan kondisi lokal.
- Program yang menunjukkan kemampuan riset dan teknologi Indonesia

## BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

### Sektor Unggulan (Subject pada kesepakatan antar kementerian/lembaga)

- Pertanian
  - Pelatihan pertanian dan peternakan
  - Bantuan peralatan pertanian
  - Inseminasi buatan
- Keluarga Berencana
- Pekerjaan Umum
- Micro Finance
- Energi
- Politeknik
- Bidang lain yang masih memerlukan konfirmasi
- Industri kecil (Pengelolaan bambu dan rotan)

## BAB VIII. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014

- Misi Kerjasama Selatan-Selatan tahun 2011-2014.
- Fokus Kawasan dan Program Unggulan
  - 4 Kawasan
  - Program unggulan
- Agenda
  - Agenda I : Penguatan kelembagaan
  - Agenda II: Penguatan kerangka hukum
  - Agenda III : Pengembangan Sistem Pendanaan Kegiatan KSS
  - Agenda IV: Penguatan Pelaksanaan Program-program Unggulan
  - Agenda V : Promosi dan Publikasi
  - Peta Jalan Agenda KSS Indonesia 2011-2014

## KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014

### Fokus Kawasan

- Sesuai RPJM dan Renstra Kemlu
  - Kawasan Pasifik
  - Asia Selatan
  - Afrika
  - Amerika Latin

### Program Unggulan

- Berdasarkan kesepakatan kementerian/lembaga

## Membangun dan Memperkuat Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia

### Pendanaan, Mekanisme Penyaluran dan Program Unggulan

#### Pendanaan

- Landasan Peraturan perundangan
- Bentuk/Jenis Pendanaan
- Sumber Pendanaan
  - Pemerintah
  - Mitra Internasional
  - Swasta
- Optimalisasi penggunaan Dana
- Tata cara pengelolaan
  - Bersumber dari dalam negeri
  - Bersumber dari luar negeri
  - Indonesia sebagai pemberi bantuan
- Mekanisme Penyaluran
- Akuntabilitas keuangan

#### Sektor Unggulan yang teridentifikasi (Subject pada kesepakatan antar kementerian/lembaga)

- Pertanian
  - Pelatihan pertanian dan palernakan
  - Bantuan peralatan pertanian
  - Magang
  - Inseminasi buatan
- Keluarga Berencana
- Pekerjaan Umum
- Micro Finance
- Energi
- Politehnik
- Industri kecil (Pengelolaan bambu dan rotan)

#### Program Unggulan

- Definisi dan Kriteria program unggulan
- Bentuk program unggulan
- Meningkatkan dan mempertahankan program unggulan
- Kesesuaian program unggulan dengan kebutuhan negara berkembang
- Keselarasan program unggulan dengan RPJMN
- Manfaat program unggulan bagi kepentingan nasional
- Kendala dalam menjadikan suatu program menjadi program unggulan
- Evaluasi program unggulan

Kerjasama Ekonomi  
antar  
Negara Berkembang

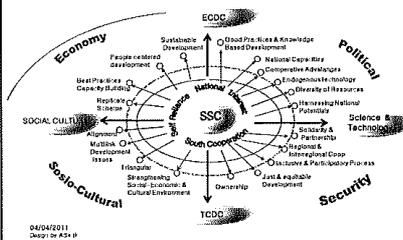
Pertemuan Koodinasi dan Konsultasi  
Tim Koordinasi KSS

Hotel Nikko  
16 Februari 2011

Grand Design  
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia

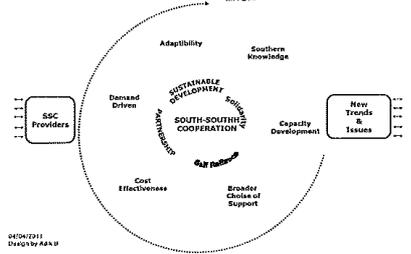
04/04/2011  
Design by AA&B

South-South Cooperation "Compass"



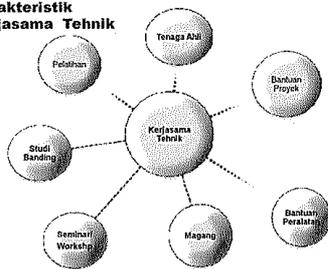
04/04/2011  
Design by AA&B

Karakteristik Kerjasama  
Selatan-Selatan



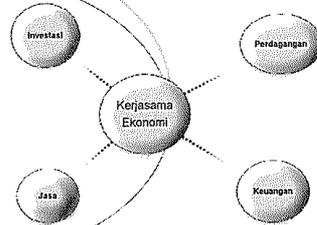
04/04/2011  
Design by AA&B

Karakteristik  
Kerjasama Teknik



04/04/2011  
Design by AA&B

Karakteristik Kerjasama Ekonomi



04/04/2011  
Design by AA&B

### RASIONAL PENYUSUNAN

- PJM 2010-2014
- Hasil Kajian CEACOS UI "Arah Kebijakan Indonesia Dalam kerjasama Selatan-Selatan"
- Berbagai Sidang Internasional yang menekankan pentingnya Kerjasama Selatan-Selatan.... "Acra Agenda of Action"
- Munculnya berbagai kecenderungan dan tantangan baru dalam KSS
- Peran Indonesia ke depan ... anggota G-20... Ketua ASEAN 2011
- Koordinasi Internal ....fragmentasi pelaksanaan KSS

### KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

- Pendekatan Holistik .... semua aspek KSS
- Lingkungan strategis pada tingkat nasional dan internasional
- Peran Indonesia pada masa lalu, saat ini dan ke depan
- Posisi dan peran Kelembagaan yang ada dan visi serta bentuk kelembagaan ke depan
- Aspek koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi
- Program dan kapasitas yang saat ini ada dan bagaimana penguatan kapasitas dan program KSS Indonesia ke depan
- Kerjasama horizontal antar negara berkembang dan vertikal antar kementerian/lembaga dalam KSS Indonesia
- Pemahaman mengenai KSS Indonesia

### Tujuan Grand Design KSS Indonesia

#### Memperkuat, meningkatkan dan memperluas KSS Indonesia

- Kerangka hukum
- Kelembagaan
- Koordinasi
- Program KSS
- Pembinaan
- Promosi
- Informatikan sistem

#### Rumusan kebijakan KSS Indonesia yang berskala internasional

- Menjawab berbagai tantangan dan kecenderungan baru yang muncul
- Menemukan tantangan dan global isu dengan mendiatikan peluang-peluang baru
- Program yang mendapat penelmatna luas di negara berkembang
- Berbasis pada kemampuan dan pengalaman dalam pembangunan yang dapat di "share"

#### Rumusan aksi

- Langkah tindak dalam memperkuat, meningkatkan dan memperluas KSS Indonesia

### Format Grand Design Nasional KSS Indonesia

#### BAB I PENDAHULUAN

#### BAB II KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN

#### BAB III PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB IV KERANGKA KELEMBAGAAN

#### BAB V SUMBER PENDANAAN

#### BAB VI PROGRAM UNGGULAN

#### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### BAB VIII KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE II 2011-2014

### Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat Sipil, Swasta dan Perguruan Tinggi

#### Pendorong Kerjasama Selatan-Selatan

- Membantu membangun ketahanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan terutama masyarakat akar rumput;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
- Memperluas akses masyarakat terhadap berbagai informasi
- Membangun alternatif solusi
- Memperkuat kapasitas masyarakat
- Menyebarkan berbagai pengetahuan dan "best practices".

### Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

- Salah satu pola untuk meningkatkan KSS
- Bentuk : Sister City/Provinces
- Telah dilakukan oleh beberapa Kota/Propinsi
- Mendorong pengenalan, promosi dan perluasan produk lokal dan investasi
- LRU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pihak Luar Negeri

## BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

- APBN
- MITRA KERJASAMA
- SWASTA

## APBN

Kunci utama keberhasilan KSS Indonesia adalah ketersediaan dana pemerintah

- Strategi dan kebijakan keuangan negara yang di tempuh melalui upaya optimalisasi pengeluaran pemerintah... RPJM 2010-2014
- Penajaman alokasi anggaran agar dapat lebih terarah dan terpadu
- Pengaturan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan Kerjasama Selatan-Selatan yang bersumber baik dari dana APBN maupun dari pihak mitra pembangunan dan pemberi bantuan
- Meningkatkan dan memperkuat tata kelola keuangan Kerjasama Selatan-Selatan melalui panduan mekanisme yang baku
- Memperhatikan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

## SUMBER PEMBIAYAAN

### Bilateral

- Berdasarkan "cost Sharing"
- Sepenuhnya dari Indonesia

### Multi Lateral

- Perez Guerero Trust Fund
- UNDP Trust Fund
- Badan PBB lain
- Organisasi Internasional (CKI, G-15, D-8)

### Triangular Cooperation

- Segi tiga Indonesia-negara berkembang-mitra internasional
- Segitiga Indonesia-negara berkembang-negara berkembang
- Segitiga Indonesia-negara berkembang-lembaga pembiayaan internasional

## SUMBER PEMBIAYAAN

### SWASTA DAN PERBANKAN

- Dana CSR
- Lembaga Pembiayaan
- Perbankan

## BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

- Fokus pada Kerjasama Teknik dan Kerjasama Ekonomi
- Program yang mempunyai *multiplier effect* dan menjadi katalis dalam proses pembangunan.
- Keunggulan komparatif Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan mendasak dari negara Selatan seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan ketahanan pangan.
- Program yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan produktivitas nasional.
- Program yang mengandung proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta mengandung solusi yang dapat beradaptasi dengan kondisi lokal.
- Program yang menunjukkan kemampuan riset dan teknologi Indonesia

## BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

### Sektor Unggulan Kerjasama Teknik

- Bidang pertanian
- Pelatihan pertanian dan peternakan
- Bantuan peralatan pertanian
- Inseminasi buatan
- Keluarga Berencana
- Pekerjaan Umum
- Micro Finance
- Energi
- Politehnik
- Bidang lain yang masih memerlukan konfirmasi
- Industri kecil (Pengelolaan bambu dan rotan)

#### BAB VIII. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE 1: 2011-2014

- Misi Kerjasama Selatan-Selatan tahun 2011-2014.
- Fokus kawasan dan Program Unggulan
  - 4 Kawasan
  - Program unggulan
- Agenda
  - Agenda I : Penguatan kelembagaan
  - Agenda II: Penguatan kerangka hukum
  - Agenda III : Pengembangan Sistem Pendanaan Kegiatan KSS
  - Agenda IV: Penguatan Pelaksanaan Program-program Unggulan
  - Agenda V : Promosi dan Publikasi
  - Peta Jalan Agenda KSS Indonesia 2011-2014

## Membangun Kerjasama Ekonomi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia

#### KERJASAMA EKONOMI (KENB)

- Semakin mendapat tempat
- AFTA
- Kerjasama ASEAN-China-India
- Mercosur (Amerika Latin)
- Common Market for East and Southern Africa (COMESA)
- SAFTA (South Asian Free Trade Agreement)
- SADC (Southern African Development Community)
- India, Brazil and South Africa (IBSA)

#### PENDORONG KENB

- Kerjasama KENB lebih banyak pada bidang Perdagangan
- Membantu diversifikasi export
- Meningkatnya "share" dari perdagangan dunia dapat mendorong "collective actions" untuk meningkatkan posisi tawar
- Teknologi yang ada di negara berkembang/selatan lebih tepat bagi kebutuhan dan persyaratan negara berkembang

#### Bidang Investasi

- Peningkatan penanda tangan "Bilateral Investment Treaties (BITs)"
- Tahun 2004 dari 73 BITs yang di tanda tangani, 28 merupakan perjanjian antar negara berkembang
- Negara seperti China, Korea Selatan dan Malaysia telah menandatangani lebih dari 40 BITs dengan negara-negara berkembang lainnya

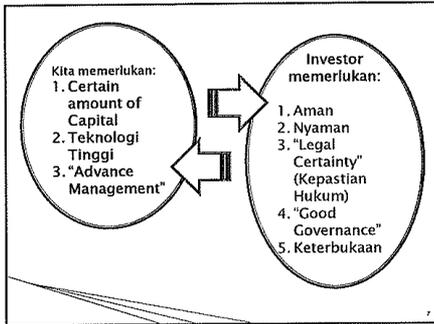
#### Meneropong KENB

- Sebagai jembatan dalam kerjasama multilateral dan perekonomian-perdagangan dunia – bukan sebagai alternatif
- Harus lebih meng-Global... tidak hanya intra kawasan
- Bukan bentuk lain dari *preferential trading arrangements*.
- Harus di lakukan dalam perspektif yang lebih luas dari kerjasama ekonomi termasuk kerjasama teknik dan ahli teknologi

#### Pendekatan untuk mendorong KENB

- Persepsi pelaku dunia usaha terhadap KSS
- Upaya dan kegiatan dunia usaha yang telah dilakukan dengan negara berkembang....kawasan
- Bentuk kerjasama dan jenis produk
- Isu atau kecenderungan yang berkembang
- Kendala yang di hadapi
  - Di dalam negeri
  - Di negara berkembang
- Peranan Pemerintah
- Partisipasi dan peran dunia usaha melalui CSR
- Inter relasi antara kegiatan dunia usaha dengan inisiatif program pembangunan
- Integrasi CSR dengan kerjasama bilateral & Multilateral





Komoditas Apa saja yang Negara-negara Afrika perlukan?  
 1. DiJen Aspasaf, NAFEDI(BPEN), para ATDAG, KADIN Komite Afrika selalu menerima pelbagai inquires dari luar negeri, menertima delegasi dagang, ikut Joint Commission, One to one Business Meeting, ikut dalam Kerjasama 2 club Bisnis bilateral seperti ISAB (Indonesian South Africa Business Partnership dll), Manfaatkanlah!

2. Contoh Produk yang diminati Negara2 Afrika Selatan:  
 • TPT (Tekstil dan produk tekstil)  
 • Mebel dan furniture  
 • Alat Telekomunikasi  
 • Perlengkapan Rumah Tangga  
 • Seragam Miller  
 • Mesin Pertanian  
 • Perlengkapan Industri Minyak  
 • Produk makanan/minuman (Terigu, Makanan minuman kaleng dll)  
 • Crude Palm Oil, Pupuk  
 • Spare Part Mobil, Motor  
 • Ban.  
 • Kosmetik,  
 • Franchise, Joint Venture Teknologi Tepat Guna untuk Negara Lainnya.

Beberapa catatan kunjungan Misi Dagang:

2000 - 2007 ke Afrika Selatan Zimbabwe Namibia telah ada MOU antar KADIN ada one on one meeting, produk yang diminati hingga Para pengusaha Indonesia telah beroperasi disana:  
 TPT, furniture, obat2 an dan alat kesehatan, kosmetik, barang listrik, mesin pertanian, Engineering dan konstruksi, Solar Energy, Pertambangan, Semen

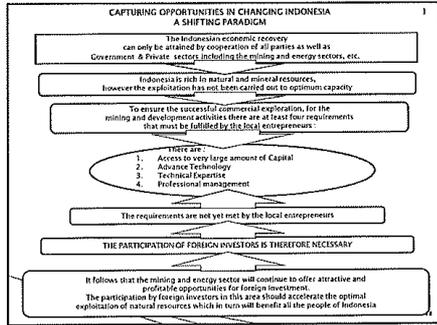
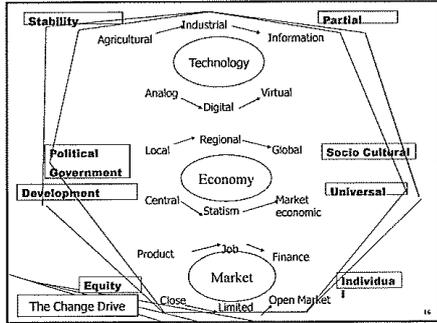
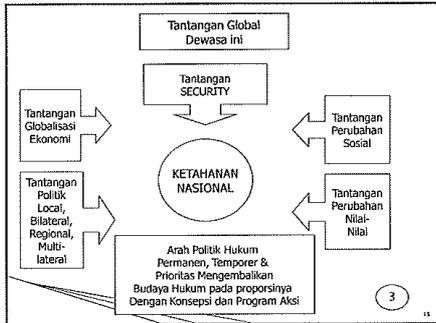
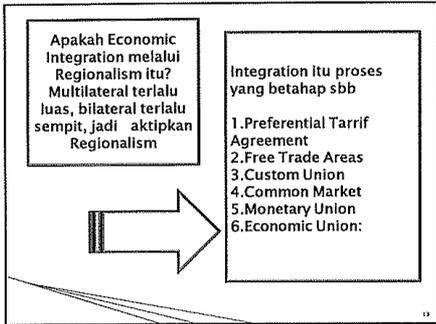
Kunjungan Menteri Perindustrian Afzel disamping bicara tentang investasi dan Industri telah mendukung pendirian Indonesia House di Johannesburg, ingin ada Joint Production dan joint manufacturing Afzel ini penting peranannya didalam IORARC aktif juga didalam ASDC Southern African Development Cooperation. Juga mereka menawarkan kerjasama dalam pengolahan aluminium dari Bauxit Indonesia, eksplorasi tambang emas kedalaman 500 m, Afzel adalah produsen terbesar batubara namun net Importer minyak bumi, migas dikembangkan dengan Namibia dan Mozambique

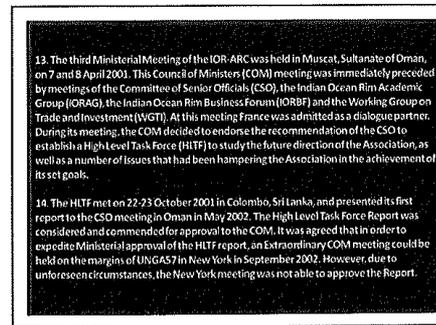
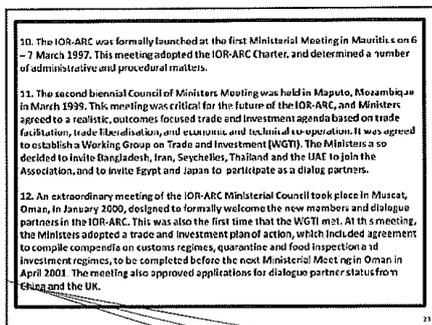
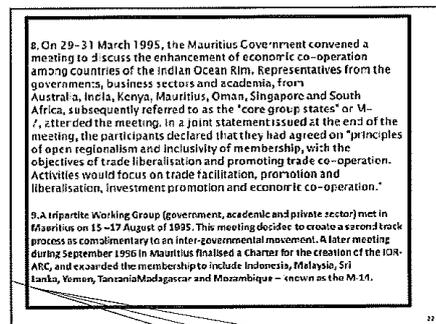
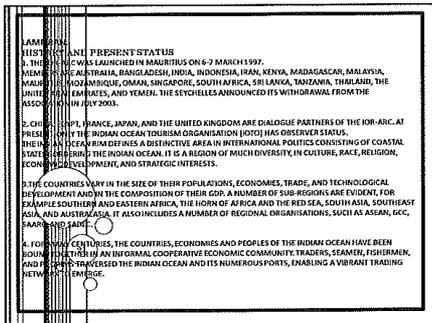
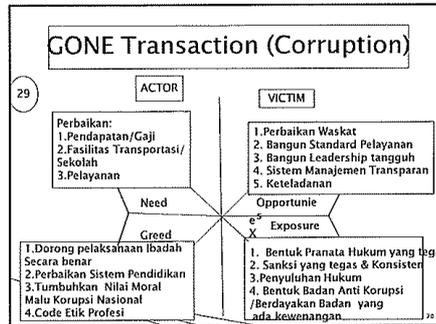
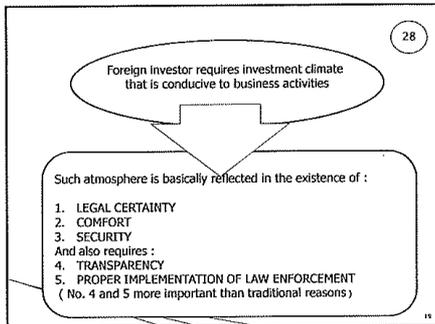
Export Indonesia ke Afzel 99 % non migas terdiri dari Boiler, Garment, Alas kaki, kertas, produk kayu (plywood), umsi, kendaraan bermotor, industri mineral, karet, minyak nabati, kaca, barang kimia, barang konsumsi. Pertumbuhan ekspor pertahun cukup pesat meningkat sekitar 70 %, sekitar USD 200 juta keatas. Import Indonesia 99 % komoditas non migas yang terdiri dari Pulp, Aluminium, pupuk buatan pabrik, tembakau, kapas, besi lembaran dan kawat, tembaga, mesin, bahan kimia, benang tekstil dan barang mineral sebelum tahun 2000 impor Indonesia sekitar USD 260 juta terjadi naik turun. Setelah tahun 2000 Neraca perdagangan Indonesia terjadi Surplus. RI - Afzel ada lembaga Persahabatan ISAB yang didukung oleh kedua Pemerintah. Dubes baru mereka sangat aktif di Jakarta dan Afzel. Bulan Februari ini akan ada Business Meeting yang berminat sudah bisa memberikan Company profilnya kepada kami. Tanggal 30 November ada Business Meeting dengan Nigeria sesuai Joint Commission para pengusaha mereka ingin ada pertemuan man to man dan back to back. Zimbabwe bulan lalu mengirim 20 delegasinya ke Expo di Kemayoran, kami sempat adakan Business Meeting dengan Mereka. Ekspor kita kain tenun, alas kaki, kaca, ban mobil, sabun, Garment, perabot rumah tangga, kita impor besi lembaran, hasil tambang, kapas, bahan mineral, tembakau, seng dan produk logam lainnya. Negara lainnya data dapat anda dapatkan melalui KADIN Afrika dan Direktorat Afrika Deplu.

Sejauh mana Indonesia aktif di IORBF?  
 Tgl 1 Agustus 2010 di Sana' Republik Yaman diadakan Sidang IOR ARC beberapa program yang dikembangkan sbb:  
 1. Pendirian IOR ARC pada bidang Maritime Transport Council dan membuat sub Committee dg anggota India, Indonesia, Madagaskar Iran, Mauritius, Oman, Afzel, Sri langka, Tanzania, Thailand danb Yaman).  
 2. Bidang Pariwisata, Proyek Konstruksi, Kerjasama dengan ITC, Kerjasama antar budaya, Pemilihan top 100 perusahaan lalu buat B2B (Back to Back) meeting.  
 3. Peningkatan SMES (Sektor UKM)  
 4. Film Festival (usul India)  
 5. Micro Finance Capacity Building (usul Kenya)  
 6. Tourism Satellite Account agar dimasa pdsida sidang mendarang.  
 7. Iran usul ada B@B Meeting untuk Sector Konstruksi  
 8. Usul tentang Special Fund  
 Komentar kita perlunya dorongan agar kita lebih berpikir mencari pasar2 baru melalui IOR BF ini. Nampaknya terlihat para pengusaha muda sangat agresip masuk ke Afrika dan berhasil. Pengusaha besar Indonesia juga mulai masuk dan berhasil seperti Indofinma, Indofood, Pertamina, BNI, Bank Mandiri, Pabrik Kertas Uang, Konstruksi, Medco, dll.)

Adanya dampak terhadap macro economy:  
 1. & percentage GDP, PRICE, TOTAL Trade balance, IORA RC Trade Balance.  
 2. Adanya peningkatan dan perubahan pada "Monetary Effects" seperti TERMS OF Trade (Dasar penukaran), Peningkatan Produktivitas, Real Foreign Interest Rate  
 3. Peluang menstimulasi (VV) Investasi  
 4. Meningkatkan kompetisi di kawasan  
 5. Memperluas pasar dengan diversifikasi "produk" dan menciptakan pasar "TRADE CREATION"  
 Usul agar IOR ARC punya Group Eminent Person seperti APEC  
 Indonesia harus punya psat informasi IOR ARC, semenara di DiJen ASPASAF saja dulu atau ada peminat?

Apa yang diharapkan bila kita aktif di mandala REGIONALISME, seperti IOR ARC ini?





25

**PRINCIPLES OF THE IOR-ARC**

15. The Charter declares that the IOR-ARC seeks to build and expand understanding and mutually beneficial co-operation through a consensus based, evolutionary and non-intrusive approach. There are no laws and binding contracts. Compliance with consensus based decision remains without any rigid institutional structure to specify any rules and regulations. Co-operation is based on principles of sovereignty, equality, territorial integrity, political independence, and non-interference in internal affairs, peaceful coexistence, and mutual benefit.

16. Membership is open to all sovereign states of the Indian Ocean Rim willing to subscribe to the principles and objectives of the Charter. The IOR-ARC is firmly based on the principle of open regionalism, as encouraged by the WTO. Decisions on all matters and issues and at all levels, will be taken on the basis of consensus. The IOR-ARC explicitly excludes bilateral relations and other issues likely to generate controversy and be an impediment to regional co-operation.

Co-operation within the Association does not prejudice the rights and obligations of the member states within the framework of other economic and trade co-operation arrangements and will not apply automatically to member states of the Association. It does not seek to be a substitute for, but to reinforce, be complementary to and consistent with, the bilateral, plurilateral and multilateral rights and obligations of member states.

Within the framework of the Association, member states will pursue measures to promote the achievement of its objectives, and will not take any action likely to prejudice its objectives and activities. The work programmes of the Association will be undertaken by member states on a voluntary basis.

**IOR-ARC OBJECTIVES**

17. The main focus of the IOR-ARC is on economic co-operation and particularly on trade and investment. It is primarily an outward looking forum for economic dialogue and co-operation. The open regionalism in IOR-ARC has four components:

**I. TRADE LIBERALISATION**  
Non-discriminatory basis towards members  
4.2015 deadline to reduce tariffs to zero for all member countries of the IOR-ARC.

**II. TRADE AND INVESTMENT FACILITATION**  
Sharing of information on trade finance, investment regime, intellectual property, procurement procedures, customs regulations, quarantine requirements, etc.  
Harmonization of standards.

**III. ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION**  
Identifying specific areas for economic and technical cooperation.  
Building capacity for trade and investment cooperation

**IV. TRADE AND INVESTMENT DIALOGUE**  
Regular meetings of government officials, businessmen, and academics from the member states.

27

4. To encourage close interaction of trade and industry, academic institutions, scholars and peoples of the Member States, without discrimination among Member States and without prejudice to obligations under other regional economic and trade cooperation arrangements;

5. To strengthen cooperation and dialogue among Member States in international fora on global economic issues, and, where desirable, to develop shared strategies and take common positions in the international fora on issues of mutual interest; and

6. To promote cooperation in development of human resources, particularly through closer linkages among training institutions, universities and other specialised institutions of the Member States.

28

According to the Charter, the objectives of the Association are: To promote the sustained growth and balanced development of the region and of the Member States and to create common ground for regional economic cooperation;

1. To focus on those areas of economic cooperation which provide maximum opportunities to develop shared interests and reap mutual benefits. Towards this end, to formulate and implement projects for economic cooperation relating to trade facilitation, promotion and liberalizations, promotion of foreign investment, scientific and technological exchanges, and tourism, movement of natural persons and service providers on a non-discriminatory basis; and development of infrastructure and human resources, as laid down in the Work Programmes of the Association;

2. To identify other areas of cooperation as may be mutually agreed;  
Towards promoting liberalizations to remove impediments to, and lower barriers towards, freer and enhanced flow of goods, services investment and technology within the region;

3. To explore all possibilities and avenues for trade liberalizations with a view to augmenting and diversifying trade flows among Member States;

4. Through closer linkages among training institutions, universities and other specialization institutions of the Member States.

29

**IOR-ARC STRUCTURE/INSTITUTIONAL MECHANISMS**

The IOR-ARC combines officials, business and academics as an integral part of its functioning in a unique tripartite structure. It involves a co-ordinated endeavour of Officials (CSO), Academics (IORAG), and businesspeople (IORBF) of the member countries, ensuring that officials alone will not be responsible for its functioning. The IORBF and the IORAG have both been actively involved in the consideration, formulation and implementation of the projects in the work programmes of the IOR-ARC, as well as the conceptualisation of the Association itself.

30

**Council of Ministers (COM)**  
 The highest authority of the Association rests with the Council of (Foreign) Ministers (COM), which meets once every two year (or more often as mutually decided). The COM formulates policy, reviews progress on co-operation, makes decisions on new areas of co-operation and on the establishment of additional mechanisms or matters of general interest.

**Committee of Senior Officials (CSO)**  
 The Committee of Senior Officials (CSO) is composed of government officials of Member States. It meets as often as mutually decided (but at least once a year). It reviews the implementation of the decisions taken by the COM, and, in co-operation with the IORBF and the IORAG,  
 Establishes priorities of economic co-operation  
 Develops, monitors and co-ordinates work programmes  
 Mobilises resources for financing work programmes.  
 The CSO submits periodic reports to the COM, and refers policy matters to the COM for its decision.

31

**Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)**

The IORBF may meet together with the COM (Council of Ministers) and the CSO (Committee of Senior Official), or as often as mutually decided. It interacts with the CSO and the Secretariat in the consideration, formulation, and implementation of the policy and work programmes of the Association. The IORBF may draw upon other non-governmental regional business networks, as necessary. The IORBF was seen as part of a unique structure, created as an opportunity to build bridges and increase networking between the three tiers within the region.

32

**Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)**  
 The IORAG may meet together with the COM and the CSO, or as often as mutually decided. It interacts with the CSO and the Secretariat in the consideration, formulation, and implementation of the policy and work programmes of the Association. The IORAG may draw upon other non-governmental regional academic networks, as necessary.

The IORAG was seen as part of a unique structure, created as an opportunity to build bridges and increase networking between the three tiers of government, private sector and academia, within the region.

Financial constraints faced by Universities worldwide, have hampered participation by academics in the IORAG. This issue has featured at all the meetings of the IORAG, and they have consistently called on member states to facilitate the participation by members of the academic group.

33

At the first meeting of the IORAG in March 1997 in Mauritius, the IORAG identified the following projects:  
 Clear and Associate Fellows in Indian Ocean Studies  
 Investment Facilitation and Promotion (jointly with the IORBF)  
 Trade Promotion Programme (jointly with IORBF)  
 Development, Upgrading and management of Seaports: Maritime Transport  
 Insurance and Re-insurance (jointly with IORBF)  
 Human Resource Development Cooperation (jointly with IORBF), and  
 Tourism promotion and Development.

At the second meeting in Mauritius in March 1998, as well as at the third meeting of the IORAG in Mozambique in March 1999, a number of new projects were added to the list. At the fourth meeting of the IORAG in Mozambique in July 2000, the meeting identified a list of impediments, operational matters, and suggestions for consideration by the COM. The latest meeting of the IORAG took place in Oman in April 2001, immediately preceding the COM meeting, also in Oman. Since then, several academic projects have been proposed by IOR-ARC members, including: "Repair, Rehabilitation and Strengthening of Coastal Reinforced Concrete Structures by Polymeric Materials" (Iran) and "Creation of a Customs Union for the North West of the Indian Ocean" (Iran).

34

**Working Group on Trade and Investment (WGTI)**  
 At the second biennial COM meeting in Mozambique in March 1999, the IOR-ARC Ministers agreed to a realistic, outcomes focused, trade and investment agenda. The basis for this agenda would be trade facilitation, trade liberalization, and economic and technical cooperation.

In order to proceed with this agenda, the Ministers adopted a resolution for the establishment of a Working Group on Trade and Investment.

The Inaugural meeting of the WGTI took place in Oman in January 2000. A second meeting of the WGTI took place again in Oman in April 2001, immediately prior to the COM meeting of April 2001.

**IOR-ARC CO-ORDINATING SECRETARIAT**  
 The IOR-ARC Charter determines that the Secretariat of the association will coordinate, service and monitor the implementation of policy decisions and work programmes, as laid down.

35